



Pemerintah
Kabupaten Sukabumi



Laporan Kinerja Kabupaten Sukabumi

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat berkat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang dijabarkan dari RPJMD tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diukur atas dasar Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan



Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintah yang baik.

Hasil pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisis dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dalam rangka terwujudnya good governance dan clean government pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palabuhanratu, Maret 2024

BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. Marwan Hamami, MM.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki Visi pemerintah tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”. Dalam mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Berikut merupakan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023:

Tabel 1 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,2	75,27	100,9%
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,45	74,65	104,48%
	Angka Kematian Ibu (AKI)	83	79,01	104,81%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,20	3,95	105,95%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,78	87,78	100%
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	7,33	98,65%
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	12,38	99,68%
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,75	7,01	96,15%
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	21,55	24,14	112,02%
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,75	7,32	131,91%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2,73	4,2	153,8%
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,6	95,6	111,68%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	0,5-1	5,85	585%
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis dan Pariwisata	3	549,75	183,25%
Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	2,5	2,5	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,41	64,68	95,95%
Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah	82,12	82,12	100%
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	67,53	67,73	100,3%
	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,8	53,47	101,26%
Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	21,83	35,48	162,53%
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	51	51	100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,36	100,41%
	Indeks Profesionalitas (Aparatur Sipil Negara) ASN	66,4	66,13	99,59%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	WTP	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	70,00	66,21	94,59%
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,50	44,76	76,51%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Pencapaian lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 adalah dalam segi prestasi. Berikut merupakan beberapa prestasi yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Penghargaan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Sukabumi sebagai Juara kedua tingkat provinsi kegiatan pengawasan kearsipan kategori "A" (memuaskan)
2. Predikat Opini WTP Terbaik selama 9 kali berturut turut atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020;
3. Penghargaan Lencana Bhakti Transmigrasi untuk Bupati Sukabumi Atas Kontribusi dan Kerja Keras Dalam Mensukseskan Program Transmigrasi;
4. BSSN Award untuk katagori Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Kabupaten;
5. Penghargaan Kak Seto Award 2023 sebagai Bupati Inspiratif penggerak pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA)
6. Penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penggerak donor darah sukarela;
7. Penghargaan Subroto Award Tahun 2023 dengan Kategori Konservasi Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Juara tiga dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2023 atas



- inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ini, bernama Silent Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center);
9. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat/Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan;
 10. Penghargaan OMBUDSMAN RI predikat kepatutan standar pelayanan publik tahun 2023 dengan Opini Penilaian berpredikat Tinggi dengan Kategori Hijau;
 11. penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Untuk Kategori Nindya Tahun 2022
 12. Sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan, penghargaan diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI); dan
 13. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kategori BAIK. Penghargaan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.5 Penjelasan Umum Organisasi.....	4
1.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	6
1.5.2 Aspek Strategis dan Masalah Utama	15
1.6 Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	22
2.1.1 Visi.....	22
2.1.2 Misi.....	23
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	24
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.....	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Pengukuran Kinerja 2023	42
3.2 Analisis Capaian Kinerja	43
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	43
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	48
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	60
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	63
3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	71



3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	74
3.2.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.....	78
3.2.8 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.....	81
3.2.9 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.....	89
3.2.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10.....	94
3.2.11 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11.....	98
3.2.12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12.....	101
3.2.13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13.....	105
3.2.14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14.....	109
3.2.15 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15.....	115
3.2.16 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16.....	118
3.2.17 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17.....	123
3.2.18 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18.....	140
3.2.19 Analisis Capaian Kinerja Program yang Menunjang Sasaran Strategis.....	144
3.3 Analisis Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran.....	149
3.3 Realisasi Anggaran.....	195
3.4 Inovasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.....	204
3.5 Prestasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.....	225
BAB IV PENUTUP.....	229
4.1 Kesimpulan.....	229
4.2 Langkah Strategis.....	231
LAMPIRAN.....	241



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026.....	15
Gambar 3. 1	Aplikasi SIMPEG Kabupaten Sukabumi.....	204
Gambar 3. 2	Aplikasi Mangkaning Kabupaten Sukabumi.....	205
Gambar 3. 3	Aplikasi E-Lok Kabupaten Sukabumi.....	205
Gambar 3. 4	Aplikasi SIAP Kabupaten Sukabumi.....	207
Gambar 3. 5	Website Silent Center.....	208
Gambar 3. 6	Aplikasi RISTI Kabupaten Sukabumi.....	209
Gambar 3. 7	Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sukabumi	211
Gambar 3. 8	Piagam Penghargaan Daerah dengan Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Terbaik Tahun 2023	226
Gambar 3. 9	Piagam Penghargaan Pelayanan Status Kepegawaian Kabupaten Sukabumi	227
Gambar 3. 10	Dokumentasi Juara I PNS Berprestasi Tk. Provinsi Kategori Inspiratif.....	227



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.....	6
Tabel 1.2	Aspek Strategis dan Masalah Utama.....	15
Tabel 2. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026	24
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	29
Tabel 2. 4	Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2. 5	Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan	33
Tabel 2. 6	Rencana Anggaran Program berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023	33
Tabel 3. 1	Perhitungan Capaian Kinerja dalam Pengukuran Kinerja.....	42
Tabel 3. 2	Perhitungan Penyerapan Anggaran.....	43
Tabel 3. 3	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	45
Tabel 3. 4	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH)	49
Tabel 3. 5	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI).....	53
Tabel 3. 6	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB).....	57
Tabel 3. 7	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	61
Tabel 3. 8	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	65
Tabel 3. 9	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)	68
Tabel 3. 10	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan.....	72



Tabel 3. 11	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan	76
Tabel 3. 12	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	79
Tabel 3. 13	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	83
Tabel 3. 14	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87
Tabel 3. 15	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	91
Tabel 3. 16	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata	95
Tabel 3. 17	Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	99
Tabel 3. 18	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	103
Tabel 3. 19	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah.	107
Tabel 3. 20	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	110
Tabel 3. 21	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	113
Tabel 3. 22	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	116
Tabel 3. 23	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten	120
Tabel 3. 24	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	124
Tabel 3. 25	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	127
Tabel 3. 26	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	130



Tabel 3. 27	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.....	137
Tabel 3. 28	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah.....	141
Tabel 3. 29	Analisis Capaian Kinerja Program yang Menunjang Sasaran Strategis.....	144
Tabel 3. 30	Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran.....	150
Tabel 3. 31	Laporan Realisasi Anggaran Program Pembangunan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi.....	195
Tabel 4.1	Simpulan Umum dan Langkah Strategis Perbaikan Kinerja.....	231



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen Laporan Kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah tersebut. Esensi dari prinsip akuntabilitas adalah sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan.



1.2 Landasan Hukum

Berikut merupakan landasan hukum dalam Laporan Kinerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2023:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Otonomi daerah lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat tercermin dari struktur kelembagaan yang dibentuk. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu dibakukan nomenklatur penamaan Perangkat Daerah secara tepat dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembakuan Nomenklatur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi meliputi:

a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Bagian Tata Pemerintahan
6. Bagian Hukum
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat
8. Bagian Kerjasama
9. Bagian Perekonomian
10. Bagian Sumber Daya Alam
11. Bagian Administrasi Pembangunan
12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13. Bagian Organisasi
14. Bagian Umum
15. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16. Bagian Perencanaan dan Keuangan



b. Perangkat Daerah di Luar Sekretariat Daerah

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pendapatan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pekerjaan Umum
12. Dinas Sosial
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Ketahanan Pangan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Arsip dan Perpustakaan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Perikanan
29. Dinas Pertanian
30. Dinas Peternakan
31. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
32. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
33. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
34. Satuan Polisi Pamong Praja
35. Kecamatan
36. Kelurahan



1.5 Penjelasan Umum Organisasi

1.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN						
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.						
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	SS1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	01.01	Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan	01.01.01	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
			01.01.02	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan		
			01.01.03	Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan		
			01.01.04	Meningkatkan kualitas keimanan guru dan siswa		
	SS2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	02.01	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	02.01.01	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
					02.01.02	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
					02.01.03	Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
					02.01.05	Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
			02.02	Meningkatnya peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	02.02.01	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
					02.02.02	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
					02.02.03	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
					02.02.04	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
			02.03	Meningkatkan infrastruktur kesehatan	02.03.01	Meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan
					02.03.02	Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat terhadap akses keterjangkauan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit.
	SS3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	03.01	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	03.01.01	Meningkatkan ketahanan keluarga serta partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
	SS4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	04.01.01	Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum
					04.01.02	Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					04.01.03	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
					04.01.04	Meningkatkan minat baca dan belajar tenaga pendidik dan masyarakat
	SS5	Menurunnya tingkat kemiskinan	05.01	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	05.01.01	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
					05.01.02	Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
					05.01.03	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	SS6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	06.01	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	06.01.01	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan
					06.01.02	Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	SS7	Menurunnya tingkat pengangguran	07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	07.01.01	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional
					07.01.02	Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
			07.02	Memperluas kesempatan kerja	07.02.01	Optimalisasi <i>Silent Center</i> dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
					07.02.02	Memperluas Kesempatan Kerja



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki
					07.02.03	Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata
					07.02.04	Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
					07.02.05	Mengoptimalkan peranan <i>stakeholder</i> ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.	SS8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	08.01	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	08.01.01	Ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan
					08.01.02	Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
					08.01.03	Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
					08.01.04	Mencetak agripreneur milenial yang potensial
					08.01.05	Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.06	Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan
					08.01.07	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan			
			08.02	Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/ permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan	08.02.01	Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian		
					08.02.02	Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan		
			08.03	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan		
					08.03.02	Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu		
					08.03.03	Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan		
			SS9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	09.01	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia	09.01.01	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia
							09.01.02	Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)
					09.02	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	09.02.01	Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan
							09.02.02	Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata alam, wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)
							09.02.03	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Arah Kebijakan		
					09.02.04	Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi
					09.02.05	Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional
					09.02.06	Optimalisasi konsep <i>Community Based Tourism</i> dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes
	SS10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan pariwisata	10.01.01	Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata
					10.01.02	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
					10.01.03	Mendorong sinergi antar sektor dan <i>stakeholder</i> dalam peningkatan investasi daerah
					10.01.04	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS
	SS11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	11.01	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01	Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha
					11.01.02	Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
					11.01.03	Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah
			11.02	Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha	11.02.01	Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM
					11.02.02	Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						pengembangan usaha
					11.02.03	Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan
					11.02.04	Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
	SS12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.01	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	12.01.01	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
					12.01.02	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada)
					12.01.03	Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah						
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	SS13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	13.01	Meningkatkan ketersediaan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	13.01.01	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			13.02	Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	13.02.01	Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					13.02.02	Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
	13.03	Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	13.03.01	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia layanan jaringan publik		
	SS14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	14.01	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	14.01.01	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian



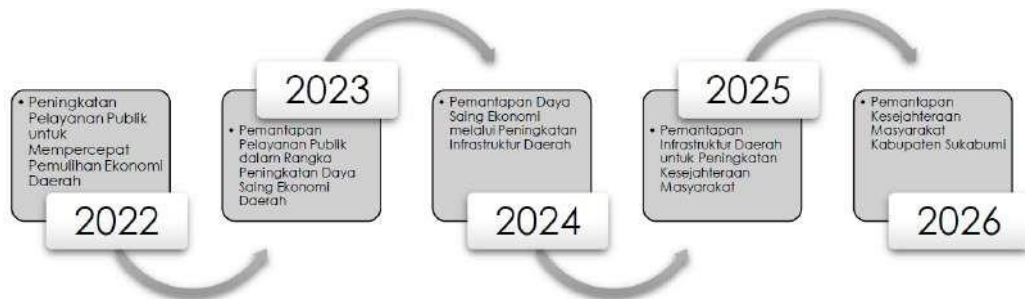
Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan				
	SS15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	14.02	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	14.01.02	Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial			
					14.02.01	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten			
			15.01	Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar	15.01.01	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana air minum			
					15.01.02	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi (persampahan, air limbah domestik, drainase permukiman)			
			15.02	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	15.02.01	Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan			
					15.02.02	Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana			
			15.03	Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan	15.03.01	Meningkatkan kualitas PSU permukiman			
					15.03.02	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik			
			15.04	Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	15.04.01	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan			
			SS16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	16.01	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	16.01.01	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang	
							16.02.01	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten	
			Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel						
			Terwujudnya sistem pemerintahan	SS17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	17.01	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	17.01.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur



Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
yang akuntabel dan melayani		yang profesional dan akuntabel			17.01.02	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
					17.01.03	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
					17.01.04	Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan
					17.01.05	Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu
					17.01.06	Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)
	SS18	Meningkatnya inovasi daerah	18.01	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	18.01.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan strategi dan kebijakan di atas, maka perlu adanya tema tahunan dari fokus kebijakan. Penetapan tema atau fokus RPJMD periode 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005 – 2025, yaitu “Inovasi Berkelanjutan Pada Komoditas Unggulan untuk Pengembangan Perekonomian Masyarakat Sukabumi”. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD kabupaten Sukabumi, maka fokus pembangunan lima tahunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026

1.5.2 Aspek Strategis dan Masalah Utama

Tabel 1. 2 Aspek Strategis dan Masalah Utama

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Mediasi fasilitasi konflik dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebhinnekaan guna mewujudkan kerukunan masyarakat di daerah. Dengan strategi pengelompokan perhitungan: Toleransi; Kesetaraan; dan Kerja sama.	Luasnya kabupaten Sukabumi sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Sukabumi.
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) Angka kematian ibu Angka kematian bayi	Sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	1. Kompetensi petugas dalam tatalaksana gadar neonatal perlu ditingkatkan 2. Kogistik untuk menunjang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan 3. Kebutuhan NICU belum semua RS ada
3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menurunnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pengarusutamaan gender
4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Ketersediaan sekolah	Adanya kelompok usia lanjut yang tidak memiliki ijazah pendidikan dan menolak untuk ikut program kesetaraan (Paket A, B, C).



Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Kelulusan siswa 2. Persentase siswa melanjutkan sudah cukup tinggi 3. Angka DO relatif sangat rendah 4. Secara jumlah, satuan pendidikan khususnya jenjang SD dan SMP sudah cukup banyak dan sudah tersebar di seluruh kecamatan.	Terdapat angka putus sekolah terutama berasal dari anak keluarga tidak mampu.
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	1. <i>Updating</i> data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh operator siks-nG desa. 2. Peningkatan Kompetensi operator siks-nG desa.	1. Tidak validnya data yang ada di desa disebabkan karena sulitnya mendapatkan data PMKS di desa. 2. Penanganan masalah sosial tidak bisa dirasakan secara instan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.
6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan	Pelestarian budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	Belum optimalnya infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sukabumi.	Banyaknya PHK di tahun 2023 serta tidak
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Sisi produksi sudah cukup, terutama padi-padian dan minyak/lemak sehingga konsumsinya pun sudah terpenuhi, sementara untuk umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, Z6 gula, sayur dan buah masih dibawah poin ideal Z6	Pola konsumsi pangan yang belum berimbang (Diversifikasi konsumsi pangan)



Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Pembenahan legal formal dalam meningkatkan aksesibilitas guna meningkatkan sektor pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan yang terbatas. 2. Kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata guna mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya saptapesona guna meningkatkan dan pengembangan daya tarik wisata.
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi Penanaman Modal melalui keikutsertaan dalam pameran di luar daerah. 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan dengan melakukan kunjungan ke pelaku usaha/perusahaan secara rutin dan berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar proses perizinan; 2. Penataan & sinkronisasi regulasi PMPTSP; 3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital; 4. Penguatan daya tarik investasi melalui data potensi unggulan daerah; serta 5. Sinergitas antar sektor dalam mendukung investasi daerah.



Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi teknologi pengembangan produk 2. Menjalin kerja sama/kemitraan dengan perusahaan maupun perbankan 3. Menciptakan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi 2. Keterbatasan anggaran 3. Belum terlaksananya digitalisasi database Industri Kecil Menengah (IKM) 4. Ketidaksesuaian anggaran dengan rencana anggaran 5. <i>Database</i> belum terintegrasi dan belum terorganisasi dengan baik 6. Sebagian besar teknologi pemasaran dan produksi pelaku usaha masih tradisional 7. Pemahaman teknologi dari pelaku usaha masih rendah
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah 2. Pengujian berkala kualitas air sungai dan udara ambien 3. Memberikan himbauan untuk menyusun dokumen lingkungan 4. Pengendalian pemanfaatan tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sumber daya untuk upaya pencegahan pencemaran, terutama kualitas air sungai, kualitas udara dan pengendalian tutupan lahan. 2. Kurangnya titik-titik sampel sebagai keterwakilan kualitas air sungai.
13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kerja sama dengan pihak penyedia layanan internet (provider) 2. Pemanfaatan sumber daya desa 3. Optimalisasi penerapan SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk topologi Sukabumi yang mayoritas berbentuk bukit serta wilayah yang luas serta tidak tercover dengan anggaran 2. Belum tercapainya kesepakatan dan pengambilan keputusan dari pimpinan perangkat daerah 3. Kurangnya peran swasta dan unsur masyarakat dalam pembangunan akses internet (<i>blank spot area</i>)



Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Penanganan Jalan Ruas Jalan Palabuhanratu - Cisolok, Ruas Jalan Kadudampit - Sukalarang, Ruas Jalan Cicurug - Nagrak, Ruas jalan Kebonrandu - Pamuruyan serta Pembangunan Jembatan Cinumpang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan 2. Potensi bencana alam yang tinggi dapat menurunkan kondisi mantap jalan
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Daerah Swasembada Pangan dengan adanya lumbung padi dan meningkatkan produktivitas tanam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran untuk operasi pemeliharaan jaringan irigasi 2. Potensi bencana alam yang tinggi sehingga dapat menurunkan kondisi jaringan irigasi
15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan kolaborasi pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan kapasitas masyarakat mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat perkumuhan yang tinggi 2. Cakupan luasan wilayah Kab. Sukabumi
16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	Optimalisasi pelayanan transportasi baik darat maupun ASDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Sarana prasarana pendukung layanan yang belum memadai 3. kurangnya SDM yang tersertifikasi 4. Perencanaan sistem jaringan jalan yang belum memadai mengingat cakupan wilayah Kab. Sukabumi yang cukup luas 5. Belum terintegrasinya pelayanan antar moda darat dan ASDP
17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah responden masih rendah 2. Sebagian besar responden belum memahami dengan baik penggunaan sistem informasi 3. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai target responden beberapa responden menggunakan responden pegawai perangkat daerah



Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aspek Strategis	Masalah Utama
		Indeks profesionalitas ASN	Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi ASN	Masih perlu ditingkatkan kualitas ASN dalam hal Kinerja, Disiplin dan patuh serta rasa tanggung jawab yang tinggi agar capaian kinerja program dapat tercapai
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	1. Pengelolaan keuangan bersifat <i>online</i> dengan 1 <i>database</i> 2. Pengelolaan barang milik daerah bersifat <i>online</i> dengan 1 <i>database</i>	Perubahan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan yang terjadi pada pertengahan tahun.
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah	Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Belum seluruh Perangkat Daerah mampu mencapai Target Kinerja Daerah 2. Dalam pelaporan SAKIP Perangkat Daerah belum melaporkan teknis Program dan Kegiatan yang dimaksud
18	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Aparatur yang inovatif	Belum tercapainya ekosistem inovatif dalam indeks daya saing daerah secara optimal

Sumber: Perangkat Daerah Penanggungjawab IKU Kabupaten Sukabumi

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi. Berikut beberapa sub bab pada Bab 1:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- 1.5 Penjelasan Umum Organisasi

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Berikut beberapa sub bab yang ada pada Bab 2:

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

2.3 Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut beberapa sub bab yang ada pada Bab 3:

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

3.4 Inovasi Kabupaten Sukabumi

3.5 Prestasi Kabupaten Sukabumi

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Berikut beberapa sub bab pada Bab 4:

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Strategis



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana pembangunan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026 yang merupakan penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai kepala daerah. RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis oleh perangkat daerah hingga ke level perencanaan tahunan.

2.1.1 Visi

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

- a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif. Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai



dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta pulau Jawa. Kemandirian masyarakat kabupaten Sukabumi.

b. Masyarakat Sejahtera Lahir dan batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

2.1.2 Misi

Dalam mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan beberapa misi yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.



2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian IKU daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 - 2026**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	Target					Kondisi Akhir
					2023	2023	2024	2025	2026	
IK1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	69,10	73,70	74,50	75,20	76	76	77,80	77,80
IK2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,97	71,08	71,26	71,45	71,63	71,81	72	72
IK3	Angka Kematian Ibu (AKI)	(Per 100.000 KH)	85,22	85	84	83	82	81	80	80
IK4	Angka Kematian Bayi (AKB)	(Per 1.000 KH)	4,75	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4	4
IK5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,37	87,40	87,64	87,78	87,92	88,06	88,20	88,20
IK6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,07	7,21	7,32	7,43	7,55	7,66	7,77	7,77
IK7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,23	12,33	12,38	12,42	12,47	12,51	12,56	12,56
IK8	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,09	7,06	6,91	6,75	6,60	6,45	6,29	6,29
IK9	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	N/A	19,56	20,48	21,55	22,61	23,68	24,74	24,74
IK10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,60	9,5 - 11,5	9 - 11	8,75 - 10,75	8,5 - 10,5	8,25 - 10,25	8 - 10	8 - 10



Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	Target					Kondisi Akhir
					2023	2023	2024	2025	2026	
IK11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Persen	1,05	1,93	2,33	2,73	3,13	3,53	3,92	3,92
IK12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	84,60	84,60	85,10	85,60	86,10	86,60	87,10	87,10
IK13	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Persen	-4,58	-3	(-1) - 0,5	0,5 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	3 - 4
IK14	Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis dan Pariwisata	Persen	N/A	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5
IK15	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	Persen	N/A	0,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13,4
IK16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,11	62,77	66,85	67,41	68,11	68,79	69,47	69,47
IK17	Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah	Persen	70,21	70,21	76,17	82,12	88,08	94,04	100,00	100
IK18	Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	Persen	71,42	71,42	63,53	67,53	71,53	75,53	79,53	79,53
IK19	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	59,28	59,28	50,80	52,80	54,80	56,80	58,80	58,80
IK20	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertata	Persen	8,81	13,15	17,49	21,83	26,17	30,51	34,85	34,85
IK21	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	43	43	43	51	60	67	75	75
IK22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,79	86	86,50	87	87,50	88	88,50	88,50
IK23	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	51,01	51,01	60,20	66,40	71,40	74,90	77,50	77,50
IK24	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	Target					Kondisi Akhir
					2023	2023	2024	2025	2026	
	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi									
IK25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	Poin	64,48	66	68	70	72	74	76	76
IK26	Indeks Inovasi Daerah	Poin	56	57,50	58	58,50	59	59,50	60	60

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2023, Revisi IKU dan APBD. Pemerintah daerah kabupaten Sukabumi telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing				
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,2	Poin
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH)	71,45	Tahun
		Angka kematian ibu	83	(Per 100.000 KH)
		Angka kematian bayi	4,20	(Per 1.000 KH)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,78	Poin
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	Tahun
5.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,75	Persen
6.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan	21,55	Persen
7.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,75 - 10,75	Persen
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan				
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2,73	Persen
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,6	Poin
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5 - 1	Persen
10.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	2,5	Persen



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
11.	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	2,5	Persen
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,41	Poin
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah				
13.	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	82,12	Persen
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	67,53	Persen
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,8	Persen
15.	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	21,83	Persen
16.	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	51	Persen
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel				



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
17.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87	Poin
		Indeks profesionalitas ASN	66,4	Poin
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	Opini
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah	70	Poin
18.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	58,5	Poin

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi, 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengalami Perubahan karena terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing				
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,2	Poin



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH)	71,45	Tahun
		Angka kematian ibu	83	(Per 100.000 KH)
		Angka kematian bayi	4,20	(Per 1.000 KH)
3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,78	Poin
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	Tahun
5.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,75	Persen
6.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan	21,55	Persen
7.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,75-10,75	Persen
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan				
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2,73	Persen
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,6	Poin



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5-1	Persen
10.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	3,0	Persen
11.	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	2,5	Persen
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,41	Poin
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah				
13.	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	82,12	Persen
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	67,53	Persen
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,8	Persen



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
15.	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	21,83	Persen
16.	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	51	Persen
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel				
17.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87	Poin
		Indeks profesionalitas ASN	66,4	Poin
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	Opini
		Nilai akuntabilitas kinerja daerah	70	Poin
18.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	58,5	Poin

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi, 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Berikut merupakan rencana anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi tahun 2023:

Tabel 2. 4 Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Belanja Operasi	Rp3.321.049.194.961
2	Belanja Modal	Rp506.957.125.536

3	Belanja Tidak Terduga	Rp15.573.534.525
4	Belanja Transfer	Rp686.433.048.334
Jumlah		Rp4.387.266.611.654

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi, 2023

Dengan adanya Perjanjian Perubahan, berikut merupakan rencana anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi tahun 2023:

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

Uraian	Rencana (Rp)
Belanja Langsung	Rp4.351.855.615.388

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi, 2023

Kemudian berikut merupakan rencana anggaran pada Program berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran Program berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023

URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 2.739.122.817.241
PENDIDIKAN	Rp 1.373.719.719.799
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 740.137.376.268
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 598.600.696.331
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp 566.565.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 34.265.182.200
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rp 149.900.000
KESEHATAN	Rp 900.749.718.583
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 555.571.841.291
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 309.777.970.820
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 30.713.919.272



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 50.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 4.635.987.200
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 182.905.681.346
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 44.855.411.662
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 34.714.369.218
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 102.770.900.466
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 565.000.000
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 204.806.294.427
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 12.731.898.078
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 15.590.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 7.029.940.084
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 30.673.808.635
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 15.873.971.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 1.852.891.608
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 6.638.686.800
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 150.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp 104.901.236.010
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 24.938.272.212
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 64.291.513.531
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 31.865.375.381
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 1.728.721.150
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 24.249.469.000



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Rp 6.447.948.000
SOSIAL	Rp 12.649.889.555
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 5.679.141.555
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 1.260.500.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 6.500.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2.659.448.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.079.300.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 865.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 329.723.428.729
TENAGA KERJA	Rp 14.676.904.186
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 10.505.663.972
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 20.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 117.080.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 2.284.059.564
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 1.437.630.650
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 27.920.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 284.550.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 11.250.383.006
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 5.697.052.956
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 715.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 50.000.000



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 4.087.250.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 110.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 485.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 106.080.050
PANGAN	Rp 8.679.833.871
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 6.557.867.671
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 272.350.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 1.545.616.200
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 90.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 214.000.000
PERTANAHAN	Rp 20.981.543.889
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.023.014.372
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 253.561.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 12.000.629.517
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Rp 142.375.000
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Rp 85.175.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 1.384.250.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1.092.539.000
LINGKUNGAN HIDUP	Rp 32.822.532.868
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 21.256.196.768
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 385.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 400.000.000



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 107.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 84.142.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 49.999.900
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 93.062.500
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 10.297.131.700
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 18.249.323.914
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 17.519.626.914
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 112.590.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 410.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 172.107.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 35.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 25.116.763.814
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 7.596.435.314
PROGRAM PENATAAN DESA	Rp 229.529.800
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp 31.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 1.719.999.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 15.539.799.400
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 50.734.978.819



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 15.154.304.619
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 574.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 21.332.074.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 13.674.600.000
PERHUBUNGAN	Rp 61.394.751.173
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 36.837.128.413
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 19.334.520.910
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 5.223.101.850
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Rp 18.403.924.351
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 10.967.574.751
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3.973.171.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 383.810.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 375.225.600
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.704.143.000
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp 10.031.037.087
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.570.635.887
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 75.170.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 87.310.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 52.520.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 301.988.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 200.012.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 2.118.401.200



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 625.000.000
PENANAMAN MODAL	Rp 7.397.590.567
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 6.564.938.967
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 7.500.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 304.906.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 119.245.600
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 386.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 15.000.000
KEBUDAYAAN	Rp 39.125.216.733
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.706.239.742
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.275.004.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 955.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 26.394.068.991
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 1.484.904.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 950.000.000
KEARSIPAN	Rp 10.858.644.451
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 8.515.334.451
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 330.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 1.700.069.000



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 200.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 113.241.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp 224.103.465.519
KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 32.380.392.903
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 9.182.675.653
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 8.068.965.250
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 13.491.385.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 50.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 1.587.367.000
PARIWISATA	Rp 21.422.209.134
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 9.110.308.768
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 9.256.182.366
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.412.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 75.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 1.568.718.000
PERTANIAN	Rp 128.559.787.736
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 38.356.219.286
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 11.745.874.900
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 71.973.493.450
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 1.573.225.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 175.575.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 175.000.000



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 4.560.400.100
PERDAGANGAN	Rp 41.741.075.746
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 17.576.598.989
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 19.956.476.757
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 125.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 1.923.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 285.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 150.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rp 750.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 325.000.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 400.000.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 185.954.676.071
SEKRETARIAT DAERAH	Rp 110.947.917.984
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 58.053.257.984
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 47.542.370.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 5.352.290.000
SEKRETARIAT DPRD	Rp 75.006.758.087
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 47.358.178.687
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 27.648.579.400
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 836.417.671.874



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PERENCANAAN	Rp 15.565.111.443
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 11.170.324.543
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.306.769.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 745.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.343.017.900
KEUANGAN	Rp 797.318.698.102
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 83.721.767.123
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 706.442.547.379
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.553.619.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 4.600.764.600
KEPEGAWAIAN	Rp 23.533.862.329
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 14.612.799.129
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 5.413.612.400
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 3.507.450.800
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 18.367.397.616
INSPEKTORAT	Rp 18.367.397.616
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 15.275.496.116
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 2.750.616.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 341.285.500
UNSUR KEWILAYAHAN	Rp 136.093.789.754
KECAMATAN	Rp 136.093.789.754
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 129.592.786.304



URAIAN	RENCANA ANGGARAN (PERUBAHAN APBD)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 372.820.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 4.994.584.650
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 409.451.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 267.110.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 457.036.600
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Rp 59.929.609.152
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 59.929.609.152
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 5.863.003.152
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 1.080.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 44.077.792.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 700.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 850.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 7.358.814.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:

Tabel 3. 1 Perhitungan Capaian Kinerja dalam Pengukuran Kinerja

Keterangan	Rumus Hitung
Capaian Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Kemudian pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



Tabel 3. 2 Perhitungan Penyerapan Anggaran

Keterangan	Rumus
Penyerapan Anggaran	$\text{Penyerapan Anggaran (PA)} = \frac{\text{Realisasi Anggaran (RA)}}{\text{Alokasi Anggaran (AA)}} \times 100\%$

Sumber: Tim Penyusun, 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Salah satu aspek yang penting untuk mengukur dan melihat bagaimana kinerja suatu organisasi adalah melalui akuntabilitas kinerja yang tergambarkan dengan capaian kinerja. Capaian kinerja pemerintah kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat melalui kondisi realisasi kinerja tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja juga dapat dilihat dari realisasi kinerja tahun 2023 yang kemudian dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021 dan tahun 2020. Hal ini bertujuan agar dapat ditelaah dan dianalisis sejauh mana capaian kinerja pemerintah kabupaten Sukabumi pada tahun 2023. Selain itu, juga dapat menjadi pembanding kinerja setiap tahunnya. Capaian kinerja tersebut dapat tergambarkan melalui sasaran strategis dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama perlu dibentuk tim survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada unit penyelenggara bidang kesatuan bangsa dan politik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terbentuk oleh Keputusan Bupati



Sukabumi nomor BL.03.02/KEP.777-BAKESBANGPOL/2023 tanggal 07 Oktober 2023 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Metodologi penelitian dilakukan melalui survei dengan menyebarkan angket kepada pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di Kecamatan terpilih. Wilayah Kecamatan dipilih secara *multistage random sampling* pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Secara teknis menysasar warga pemeluk agama, yang memungkinkan diperoleh gambaran aspek heterogen dan homogen pemeluk dalam menyikapi perbedaan agama baik dari dimensi toleransi, kesetaraan dalam konsep dan pelaksanaan beragama, kemudian kerjasama antar pemeluk.

Nilai survei dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama terhadap 15 unsur yang terbagi kedalam 3 aspek yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PENGHITUNGAN INDEKS} = \frac{\text{Total Nilai unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur} \times \text{Nilai Unsur Tertinggi})} \times 100$$

Untuk memperoleh nilai, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang setia unsur dengan rumus sebagai berikut:

$$IKUB = \frac{\text{Jml nilai aspek}}{5 \text{ aspek}}$$

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama:



Tabel 3. 3 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	73,7	73,7	100,00%	74,5	75,17	100,90%	75,20	75,27	100,09%	77,8	96,74%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, 2023



Indeks Kerukunan Beragama menjadi indikator penting guna mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Semakin tinggi nilai capaian Indeks Kerukunan Beragama, maka dapat diartikan bahwa kondisi kerukunan Beragama di Kabupaten Sukabumi menunjukkan peningkatan yang positif. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 75,27 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100,09%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 73,7 dengan capaian kinerja 100%, dan pada Tahun 2022 memiliki realisasi kinerja sebesar 75,17 dengan pencapaian kinerja 100,9%, Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 77,8, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 96,74%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Target Kinerja ini tidak memiliki Target Nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - Adanya fasilitasi terhadap BL.01/Kep.16-Bankesbangpol/2023 tentang TIMKORPAKEM Kabupaten Sukabumi dan kegiatan rutin Diseminasi/Silaturahmi Timkorpakem, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan dini Masyarakat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sukabumi.
- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Kurangnya jumlah dan kompetensi personal untuk melakukan pembinaan Kerukunan Umat Beragama mengingat luasnya Kabupaten Sukabumi;
 - 2) Kurangnya data, informasi, dan pemetaan wilayah terkait potensi gangguan ketertiban umum; dan
- Alternatif Solusi
 - 1) Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan;
 - 2) Penambahan jumlah dan kompetensi personal khususnya untuk melakukan sosialisasi, mediasi, diseminasi, dan pembinaan kerukunan umat beragama yang terbagi di setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi; dan
 - 3) Penggunaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan survey.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program ini menunjang dalam



meningkatkan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sasaran Strategis tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH):



Tabel 3. 4 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	71,08	71,21	100,18%	71	71,54	100,76%	71,45	74,65	104,48%	72	103,68%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 74,65 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 104,48%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100,18%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100,76%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 72. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 103,68%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Pemenuhan Sarana dan Prasarana kesehatan serta adanya upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Kompetensi petugas dalam tata laksana gadar maternal neonatal perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan; (AKI AKB)
 - 2) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan di seluruh wilayah;
 - 3) Tingkat kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; dan



- 4) Koordinasi dan sinkronisasi lintas sector yang memiliki utput terhadap peningkatan derajat Kesehatan masyarakat masih belum optimal.
- Alternatif Solusi
- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Melalui program ini menunjang dalam meningkatkan taraf dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Berikut merupakan rumus hitung dari AKI.



$$AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$$

Keterangan:

AKI = Angka Kematian Ibu (AKI)

JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu

JLH = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama
Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI).



Tabel 3. 5 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	85	137,2	38,15%	84	74,8	110,95%	83	79,01	104,81%	80	101,23%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023



Angka Kematian Ibu menjadi sebuah indikator untuk mengukur tingkat risiko oleh gangguan kehamilan atau dalam penanganannya. Selain itu, tingkat angka kematian Ibu juga dijadikan sebagai indikator dalam pelaksanaan *monitoring* kematian berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu dalam perhitungannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum diantaranya seperti tingkat pendidikan, ekonomi, sosial budaya, serta pelayanan kesehatan yang didapatkan selama masa kehamilan. Pencapaian IKU meningkatnya Jangkauan Pelayanan dalam Kualitas kesehatan Masyarakat sebagai upaya penurunan Angka Kematian ibu di Kabupaten Sukabumi mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 masih cenderung fluktuatif. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 79,01 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 104,81%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 38,15%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 110,95%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 80. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 101,23%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Adanya seJIWA RS Zonasi (sistem jejaring inovasi WA grup RS zonasi Gadar maternal Neonatal).

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) kompetensi petugas dalam tatalaksana gadar neonatal kurang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
 - 2) logistik untuk menunjang pelayanan kesehatan baik ibu hamil maupun ibu melahirkan terutama kit bagian petugas puskesmas yang melakukan *screening*, dll.
 - 3) kebutuhan NICU belum semua RS ada sehingga saat NICU penuh (hanya kapasitas terbatas) terjadi permasalahan sistem rujukan. Hanya 4 dari 9 RS memiliki NICU. (RS Sekarwangi, RS Jampangkulon, RS Hermina, RS Palabuhanratu).
- Alternatif Solusi
 - 1) Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sebesar 3% dari total anggaran sektor Kesehatan;
 - 2) Menganggarkan logistik terutama SPM bagi ibu hamil dan melahirkan; dan
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di Rumah Sakit.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Melalui Program menunjang dalam meningkatkan pemanfaatan Layanan UKM dan UKP Rujukan.



Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB).



Tabel 3. 6 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	4,3	4,3	100,00%	4,25	3,45	118,82	4,20	3,95	105,95	4	101,25%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023



Angka Kematian Bayi menjadi indikator untuk mengukur tingkat pelayanan kesehatan yang didapatkan melalui program imunisasi, pemenuhan gizi, dan penyuluhan pemberian ASI eksklusif bagi bayi yang baru lahir. Pencapaian IKU meningkatnya jangkauan pelayanan dalam kualitas kesehatan Masyarakat sebagai upaya dalam penanganan kenaikan angka kematian bayi di kabupaten Sukabumi pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 3,95 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 105,95%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 118,82%, dan Tahun 2023 memiliki capaian kinerja 105,95%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 4. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 101,25%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.



b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Adanya seJIWA RS Zonasi (sistem jejaring inovasi WA grup RS zonasi Gadar maternal Neonatal).

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Kompetensi petugas dalam tatalaksana gadar neonatal kurang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

2) Logistik untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi baru lahir di tingkatkan, seperti pengadaan buku KIA sebagai alat pantau, pemeriksaan SHK setiap SDIDTK, MTBS/M terutama kit bagian petugas puskesmas yang melakukan *screening*, dll.

3) Kebutuhan NICU belum semua RS ada sehingga saat NICU penuh (hanya kapasitas terbatas) terjadi permasalahan sistem rujukan. Hanya 4 dari 9 RS memiliki NICU. (RS Sekarwangi, RS Jampangkulon, RS Hermina, RS Palabuhanratu).

- Alternatif Solusi

1) Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sebesar 3% dari total anggaran sektor Kesehatan;

2) Menganggarkan logistik terutama SPM bayi baru lahir; dan

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di Rumah Sakit.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.



Melalui Program menunjang dalam meningkatkan pemanfaatan Layanan UKM dan UKP Rujukan.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator kinerja ini memiliki rumus hitung yaitu:

$$IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$$

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).



Tabel 3. 7 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	87,4	87,44	100,05%	87,64	87,64	100%	87,78	87,78	100%	88,2	99,52%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, 2023



Indeks Pembangunan Gender ini kemudian menjadi salah satu faktor pengukur dalam pengukuran capaian pembangunan suatu daerah yang di dalamnya telah mengakomodasi persoalan gender. Pencapaian IKU terkait meningkatnya pengarus utamaan gender dan perlindungan anak dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Gender yang dicapai setiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 87,78 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100,00% dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100,00%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 88,2. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 99,52%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Menjalankan Program-program strategis yang berpengaruh terhadap pengarusutamaan gender.

➤ Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja



- 1) Terjadi ketimpangan dalam sektor ekonomi dan pendidikan pada kaum perempuan terhadap laki-laki; dan
- 2) Belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan kasus pernikahan anak.
- 3) Kurangnya kesadaran dari Perangkat Daerah untuk menyusun anggaran dalam rangka responsif gender.

➤ Alternatif Solusi

- 1) Meningkatkan peran serta perempuan terhadap sektor pendidikan dan ekonomi;
 - 2) Meningkatkan peran gender dalam pembangunan.
 - 3) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pedoman penyusunan anggaran yang responsif gender; dan
 - 4) Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membantu dalam meningkatnya keterwakilan perempuan di sektor publik; Program Perlindungan Khusus Anak membantu dalam menurunnya kasus kekerasan terhadap anak; Program Peningkatan Kualitas Keluarga membantu dalam meningkatnya jumlah keluarga yang dibina; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak membantu dalam meningkatnya ketersediaan data terpilah; Program Pemenuhan Hak Anak membantu dalam meningkatnya jumlah desa/kelurahan layak anak; dan Program Perlindungan Perempuan membantu dalam Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan.



3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan. Sasaran Strategis tersebut memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja rata-rata lama sekolah (RLS).



Tabel 3. 8 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	7,21	7,1	98,47%	7,32	7,11	96,99%	7,43	7,33	98,65%	7,77	94,33%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 7,33 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 98,65%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 7,1 dengan capaian kinerja 98,47%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 96,99%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 7,77. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 94,33%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan sekolah, dan fasilitasi hak kesejahteraan tenaga pendidik non pns (honorar) serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan dengan berupaya memenuhi ketentuan dalam standar pelayanan minimal (SPM)



- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan;
 - 2) Aksesibilitas menuju sarana Pendidikan belum merata di seluruh wilayah;
 - 3) Belum tercapainya standar pelayanan minimal;
- Alternatif Solusi
 - 1) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata;
 - 2) Melakukan pengadaan P3K melalui BKPSDM dan Kementerian;
 - 3) Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dalam upaya peningkatan aksesibilitas penunjang urusan sekolah dan pendidikan;
 - 4) sosialisasi/promosi pendidikan kepada masyarakat, terutama berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang belum menamatkan Pendidikan; dan
 - 5) Kerjasama dengan pihak penyelenggara pesantren tradisional, agar juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (PKBM).
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran ini didukung oleh Program pengelolaan pendidikan. Melalui program ini membantu pencapaian kinerja sasaran strategis dengan tercapainya dengan baik rata rata angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan.



Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS).



Tabel 3. 9 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	12,33	12,24	99,27%	12,38	12,25	98,95%	12,42	12,38	99,68%	12,56	98,56%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) yang telah dilakukan realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 12,38 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 99,68%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 99,27% dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja 98,95%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 12,56. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 98,56%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Pemerintah telah memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu baik melalui anggaran pusat maupun anggaran daerah.
 - 2) Pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan khususnya pada jenjang SD-SMP melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan;



- 2) Aksesibilitas menuju sarana Pendidikan belum merata di seluruh wilayah;
 - 3) Belum tercapainya standar pelayanan minimal;
- Alternatif Solusi
- 1) Melakukan langkah sosialisasi dalam hal terkait dengan pentingnya mutu pendidikan di usia dini dan kesadaran masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah;
 - 2) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata;
 - 3) Melakukan pengadaan P3K melalui BKPSDM dan Kementerian;
 - 4) Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dalam upaya peningkatan aksesibilitas penunjang urusan sekolah dan pendidikan;
 - 5) sosialisasi/promosi pendidikan kepada masyarakat, terutama berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang belum menamatkan Pendidikan; dan
 - 6) Kerjasama dengan pihak penyelenggara pesantren tradisional, agar juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (PKBM).
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung sasaran strategis ini adalah Program pengelolaan pendidikan, Program pengembangan kurikulum, Program pendidik dan tenaga pendidikan, dan Program pengembangan bahasa dan sastra. Program-program tersebut membantu dalam meningkatkan peluang kelulusan siswa sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah.



3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan.



Tabel 3. 10 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	7,06	7,7	90,93%	6,91	7,34	93,78%	6,75	7,01	96,1%	6,29	88,55%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Tingkat Kemiskinan yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 7,01 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 96,1%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 90,93%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 93,78%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 6,29, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 88,55%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Melaksanakan kontinuitas *updating* DTKS oleh operator Siks-nG desa dan melaksanakan pembinaan setiap bulan ke operator Siks-nG.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
- 1) Kesulitan mendapatkan data PMKS yang valid;
 - 2) Tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial, anak berhadapan dengan kasus hukum masalah migran dan masalah sosial lainnya; dan



- 3) Belum tepat sasaran secara menyeluruh penerima iuran jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu; dan
- 4) Besarnya tunggakan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

➤ Alternatif Solusi

1. Peningkatan kemampuan terhadap PSKS untuk membantu dalam penanganan PMKS dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 2. Optimalisasi dan penguatan PUSKESOS dalam melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS dan PMKS di desa; dan
 3. Berkoordinasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial dalam penyempurnaan data DTKS dan PMKS.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung diantaranya yaitu Program Pemberdayaan Sosial membantu dalam Peningkatan kemampuan PSKS untuk menangani pemerlu masalah kesejahteraan sosial atau PMKS; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan membantu dalam Tertanganinya korban migran untuk sampai ke keluarganya; program Rehabilitasi Sosial membantu dalam tertanganinya PMKS untuk terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar; program Perlindungan dan Jaminan Sosial membantu dalam tervalidasinya data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan kriteria; dan program Penanganan Bencana membantu tertanganinya korban bencana alam mendapatkan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana serta meningkat dan terberdayakannya kesiapsiagaan sragana dan masyarakat dalam menghadapi bencana.



3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran strategis 6 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemajuan Kebudayaan.

Persentase Pemajuan Kebudayaan

Indikator kinerja ini menggambarkan tentang upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan.



Tabel 3. 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	19,56	19,56	100,00%	20,48	22,11	107,96%	21,55	24,14	112,02%	24,74	97,57%

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Persentase pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 24,14 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 112,02%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 107,96%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 24,74. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 97,57%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- 1) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- 2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Pembentukan Tim Cagar Budaya.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Belum adanya Kebijakan Roadmap Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) Kurangnya Kompetensi masyarakat penemuan benda cagar budaya;
 - 3) Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan cagar budaya; dan
 - 4) Kurangnya Pengetahuan masyarakat penemuan benda cagar budaya
- Alternatif Solusi
 - 1) Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah; dan
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pemajuan budaya terutama pengamanan cagar budaya.



3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman. Melalui program tersebut diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

3.2.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Rumus hitung dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut.

$$\text{TPT} = \left(\frac{\text{Angkatan Kerja} - \text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka



Tabel 3. 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	7 - 9	9,51	94,33%	9	7,7	114%	8,75	7,32	131,91%	8-10	108,5%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka yang telah dilakukan realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 7,32 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 131,91%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 94,33%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 114%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 8%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 108,5%. Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Menyelenggarakan bentuk inovasi yaitu Silent Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center). Meliputi informasi lapangan pekerjaan, pengaduan ketenagakerjaan dan layanan pembuatan Kartu Kuning/AK.1

➤ Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1. Terbatasnya anggaran kegiatan padat karya guna membuka peluang kerja bagi masyarakat;
2. Belum optimalnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
3. Ketimpangan gender dalam hal pembukaan peluang kerja/penerimaan kerja;
4. Adanya Gap Kompetensi antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi calon tenaga kerja; dan



5. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan oleh calon tenaga kerja.

➤ Alternatif Solusi

- 1) Perlunya dukungan kegiatan padat karya dari unsur anggaran;
- 2) Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
- 3) Memperluas kesempatan kerja;
- 4) Melakukan pembinaan lembaga pelatihan swasta;
- 5) Kuota pelatihan BLK diperbanyak; dan
- 6) Melakukan Koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi terhadap stakeholder melalui Silent Centre.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung sasaran strategis ini adalah Program Penempatan Tenaga Kerja. Program tersebut memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis yaitu membantu mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya dan kegiatan TKM, meningkatkan pengelolaan informasi aplikasi *silent centre*, dan memfasilitasi para pekerja migran Indonesia untuk berangkat kerja ke luar negeri.

3.2.8 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan. Sasaran Strategis tersebut memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.



Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/ regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Statistik pendapatan nasional/ regional tersebut juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pembangunan di segala bidang yang menjangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan untuk perencanaan pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan.



Tabel 3. 13 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	1,93	1,93	100,00%	2,33	5,4* (Menggunakan Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	231,76%	2,73	4,2* (Menggunakan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	153,85%	3,92	107,1%

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 5,2 (Menggunakan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 153,85%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 1,93, Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 231,76%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 3,92. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 107,1%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Adanya upaya meningkatkan Sinergitas lintas sektoral termasuk pihak swasta dan stakeholder.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Belum optimalnya penggunaan serta alokasi sarana dan prasarana pertanian bagi petani;
 - 2) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurang optimalnya memproteksi Lahan Pertanian Produktif;



- 3) Penerapan Teknologi dalam pertanian masih rendah;
 - 4) Dampak Perubahan Iklim sehingga mengakibatkan pergeseran pola hujan;
 - 5) Sistem database kelautan dan perikanan yang belum memadai; dan
 - 6) Belum adanya sinergi pengelolaan ekosistem kelautan dan perikanan.
- Alternatif Solusi
- 1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan;
 - 2) Melakukan Revisi Kebijakan mengenai proteksi pengalihan lahan pertanian produktif;
 - 3) Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/ permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan;
 - 4) Sinergitas lintas sektoral termasuk pihak swasta dan *stakeholder*.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang menunjang dalam ketersediaan sarana pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang menunjang dalam ketersediaan prasarana pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang menunjang kesehatan hewan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang menunjang dalam pengelolaan ikan tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang menunjang dalam pengelolaan perikanan budidaya, dan Program



Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menunjang dalam peningkatan nilai tambah dan penjualan hasil perikanan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi ini berpengaruh pada pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, dalam kaitannya Skor PPH juga menjadi indikator pengukur kecukupan mutu gizi dan keragaman pangan pada suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai data dalam penentuan kebutuhan konsumsi pangan. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.



Tabel 3. 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	84,6	84,6	100,00%	85,1	85,8	100,82%	85,6	95,6	111,6%	87,1	109,7%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 95,6 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 111,6%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100,82%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 87,1. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 109,7%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Produksi pangan atau aspek ketersediaan pangan sudah cukup baik; dan
 - 2) Akses pangan masyarakat relatif aman (pendistribusian pangan menjangkau masyarakat).
- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka percepatan pencapaian skor PPH yang ideal (100); dan



- 2) Merubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya makanan B2SA (pola konsumsi pangan) membaik tapi perlu dikampanyekan secara intensif dan berkelanjutan; dan

➤ Alternatif Solusi

- 1) Pemahaman/ pembiasaan gizi seimbang/ Triguna Makanan (sumber tenaga, sumber zat pembangunan, sumber zat pengatur);
- 2) Kampanye/ sosialisasi konsumsi makanan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman); dan
- 3) Sinergitas Lintas Sektorial termasuk pihak swasta dan *stakeholder*.

- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berkontribusi pada aspek ketersediaan pangan berupa infrastruktur pangan, program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan berkontribusi pada aspek aksesibilitas/ distribusi dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, program Penanganan Kerawanan Pangan berkontribusi pada aspek konsumsi pangan/penanganan kerawanan pangan, dan program Pengawasan Keamanan Pangan berkontribusi pada Aspek konsumsi pangan yang aman/bebas pestisida dan zat kimia lainnya.



3.2.9 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Sasaran strategis 9 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata. Sasaran strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata.

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata merupakan suatu cara yang digunakan untuk melihat pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari periode tahun sebelumnya. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata.



Tabel 3. 15 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	-3	0,1	>100%	0,5	10,1	2020,00%	0,5-1	5,85	585%	3 - 4	146%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 5,85 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 585%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, Tahun 2022 memiliki capaian kinerja >100% (Melampaui target kinerja), dan Tahun 2023 memiliki capaian kinerja 585%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 3-4. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 146%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

- 1) Adanya upaya masif terkait peningkatan kualitas SDM kepariwisataan;
- 2) Sosialisasi sadar wisata dan saptapesona; dan
- 3) Pendataan desa wisata dan potensi ekonomi kreatif.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

- 1) Kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata guna mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.



- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya saptapesona guna meningkatkan dan pengembangan daya tarik wisata;
- 3) kurangnya sarana dan prasarana pada wilayah destinasi pariwisata;
- 4) minimnya data terkait kepariwisataan; dan
- 5) Belum optimalnya promosi pariwisata secara digital.

➤ Alternatif Solusi

- 1) Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang pariwisata;
 - 2) Membenahi peraturan yang menunjang urusan terkait destinasi wisata;
 - 3) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder guna memajukan dan mengembangkan destinasi wisata;
 - 4) Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam kota sebagai sarana promosi;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program tersebut berkontribusi dalam meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang terjaring dalam wilayah destinasi wisata, dan Meningkatkan kapabilitas dan keterampilan masyarakat lokal guna meningkatkan daya Tarik wisatawan.



3.2.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata.

Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata

Nilai investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata.



Tabel 3. 16 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	2	2	100,00%	2,5	1242,9	49716,00%	3,0	549,75	183,25	4,5	122,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 549,75 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 183,25%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 49716%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 4,5, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 122,16%. Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Melakukan Pengawasan dan Pembinaan LKPM ke Pelaku Usaha / Perusahaan Secara Rutin dan Berkala.
 - 2) Membuat mekanisme atau tata cara pengajuan izin yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada pelaku usaha.
 - 3) Mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha.
- 1) Secara rutin melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media online dan media sosial seperti website DPMPTSP, Instagram, dan Facebook.



- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Terbatasnya Anggaran Untuk Mengikuti Kegiatan Promosi Investasi Sehingga Terbatasnya Kegiatan Promosi yang dapat diikuti;
 - 2) Adanya sebagian pelaku usaha mikro yang tidak melaporkan LKPM karena tidak diwajibkan oleh peraturan
 - 3) Kelalaian dan kurangnya pemahaman Pelaku Usaha melakukan kewajiban melaporkan LKPM;
 - 4) Belum selaras antara peraturan pusat dengan peraturan daerah; dan
 - 5) Masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komputer) sehingga pelaku usaha kesulitan untuk menggunakan sistem OSS RBA (Perizinan berbasis Risiko).
- Alternatif Solusi
 - 1) Secara rutin mengadakan bimbingan teknis tentang sistem OSS RBA (perizinan berbasis risiko);
 - 2) Melakukan Pemantauan Secara Berkala dan Terjadwal Ke Pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan;
 - 3) Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam kota sebagai sarana promosi;
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal berkontribusi terhadap penyediaan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukabumi, program Promosi Penanaman Modal berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor melalui kegiatan pameran dalam dan luar daerah, program Pelayanan Penanaman Modal berkontribusi meningkatkan pemahaman para pelaku usaha/masyarakat terhadap legalitas



usaha, dan program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berkontribusi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

3.2.11 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis 11 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas.

Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas

Naik kelas dibagi 3 kategori yaitu Informal ke Formal (NIB/Legalitas), Pendidikan dan Pelatihan, dan kedalam Pasar Semi Modern. Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan jumlah UMKM yang naik kelas dengan jumlah UMKM yang dibina. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas.



Tabel 3. 17 Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	0,9	0,9	100%	2,5	2,5	100%	2,5	2,5	100%	2,5	100%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 2,5 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 2,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 100%. Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Pembinaan legalitas berbasis digital (Sertifikasi Halal, NIB, Sertifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG)) IKM;
 - 2) Digitalisasi penjualan produk melalui *e-commerce*;
 - 3) Kaji terap/permodelan inovasi produk untuk IKM;
 - 4) Sinergitas kemitraan pemasaran;
 - 5) Temu intermediasi antara pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan;
 - 6) Penyediaan layanan konsultasi peningkatan kualitas pengemasan dan branding produk pelaku usaha; dan
 - 7) Melakukan seminar pemasaran produk secara online dan akses permodalan bagi calon pelaku usaha mikro.



- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi;
 - 2) Keterbatasan anggaran;
 - 3) Belum terlaksananya digitalisasi *database* Industri Kecil Menengah (IKM);
 - 4) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
 - 5) Dukungan teknologi yang rendah dan akses permodalan yang terbatas; dan
 - 6) Belum optimalnya kerjasama antar pelaku usaha.
- Alternatif Solusi
 - 1) Perumusan kebijakan daerah (Perbup/Perda) terkait pengembangan dan perlindungan hak IKM;
 - 2) Adanya kemudahan akses pembiayaan di lembaga keuangan atau perbankan;
 - 3) Adanya lembaga pemberdayaan IKM;
 - 4) Pelatihan dan pendidikan Bimtek bagi para pelaku usaha;
 - 5) Melakukan kerja sama/kemitraan; dan
 - 6) Membantu akses permodalan.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro serta Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, yang membantu dalam membantu pengelolaan kegiatan usaha atau perekonomian dalam meningkatkan skala usaha pelaku ekonomi.



3.2.12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Sasaran Strategis 12 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi gambaran atau sebuah indikasi awal yang akan memberikan kesimpulan terkait dengan kondisi suatu lingkungan, sehingga penurunan yang dicapai oleh Kabupaten Sukabumi tentunya juga berdampak pada gambaran kualitas lingkungannya pada kurun periode waktu tersebut. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Tabel 3. 18 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	62,77	63,02	100,40%	66,85	65,47	97,94%	67,41	64,68	95,95%	69,47	93,1%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IKLH yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 64,68 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 95,95%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100,40%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 97,94%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 69,47. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 93,1%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Standar nasional pada indikator kinerja ini adalah 61,08. Sehingga Kabupaten Sukabumi memiliki capaian kinerja sebesar 107%.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah;
- 2) Pengujian berkala kualitas air sungai dan udara ambien;
- 3) Memberikan himbauan, pemberitahuan, peringatan, dan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau



kegiatan untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- 4) Pengendalian pemanfaatan tata ruang.
- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
- 1) Terbatasnya Sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 2) Kurangnya sumber daya untuk upaya pencegahan pencemaran, terutama kualitas air sungai, kualitas udara dan pengendalian tutupan lahan;
 - 3) Kurang maksimalnya intervensi penanggulangan pencemaran air dan udara serta pengawasan terhadap terjadinya alih fungsi lahan, sedangkan intervensi harus dilakukan berbagai stakeholder bukan hanya dinas lingkungan hidup.
 - 4) titik pantau pemantauan yang kurang representative; dan
 - 5) supply data Indeks kualitas lahan masih dari KLHK, karena keterbatasan sumber daya di Kabupaten Sukabumi.
- Alternatif Solusi
- 1) Kolaborasi dengan instansi terkait (seperti Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang);
 - 2) Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pengendalian tutupan lahan dan pengendalian kualitas air sungai; dan
 - 3) Menambah titik-titik sampel dalam pengujian kualitas air sungai dan udara ambien.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung yaitu Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang berkontribusi dalam menerbitkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan udara emisi bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha.



3.2.13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Sasaran Strategis 13 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah.

Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah

Indikator kinerja ini menggambarkan penyediaan akses internet pada lokasi *Blankspot Area* di 115 titik (database RPJMD Tahun 2021-2026). Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah menjadi salah satu pengukur dalam pencapaian dan realisasi kinerja utama kabupaten Sukabumi guna meningkatkan luas wilayah komunikasi dan informatika daerah. Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah dihitung dengan Jumlah lokasi *Blankspot Area* yang tertangani dibagi total seluruh *blankspot area* yang ada. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah.



Tabel 3. 19 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	70,21	70,21	100,00%	76,17	76,17	100,00%	82,12	82,12	100%	100	82,12%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 82,12 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 100. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 82,12%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

1) Kerja sama dengan *provider* (pihak penyedia layanan internet);

2) Pengembangan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan jaringan; dan

3) Adanya kontribusi dari Kementerian Kominfo dalam pengelolaan penanganan lokasi *blank spot*.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Lokasi/Topologi titik blankspot internet di Kabupaten Sukabumi sangat luas dan sulit di jangkau. Sehingga intervensi penanganan menjadi sulit;



- 2) Kurangnya partisipasi para Perangkat Daerah untuk dapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada sistem SP4N Lapor; dan
 - 3) Kurangnya partisipasi para Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu.
- Alternatif Solusi
- 1) Diskominfo bekerja sama dengan Stackholder penyedia layanan internet dan Pemerintah Desa untuk mengatasi lokasi blankspot di Kabupaten Sukabumi; dan
 - 2) Evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan koordinasi antar PD supaya dapat berpartisipasi dalam tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program pengelolaan aplikasi informatika. Program tersebut membantu dalam Menyediakan layanan akses internet khususnya pada *blank spot area*.

3.2.14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sasaran Strategis 14 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya kualitas infrastruktur. Sasaran Strategis tersebut memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten dan Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten.

Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten

Indikator kinerja ini berfungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi pelayanan dasar terutama infrastruktur jaringan jalan jembatan kewenangan. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten.



Tabel 3. 20 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	59,82	72,82	121,73%	63,53	74,23	116,84%	67,53	67,73	100,3%	79,53	85,16%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 67,73 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100,3%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 121,73%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 116,84%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 79,53. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 85,16%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Pemeliharaan ruas jalan secara rutin pada setiap tahunnya.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

- 1) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan;
- 2) Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas;
- 3) Masih terdapat cukup banyak daerah rawan kecelakaan; dan
- 4) Potensi bencana alam yang tinggi yang dapat menurunkan kondisi mantap jalan.



➤ Alternatif Solusi

- 1) Mengajukan penambahan anggaran yang diajukan melalui sumber pendanaan lain selain APBD; dan
- 2) Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum melakukan kegiatan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan Jembatan dan survey kondisi jalan jembatan untuk tercapaainya Presentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap (Baik dan Sedang).

Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

Indikator kinerja ini berfungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi pelayanan dasar terutama infrastruktur Jaringan Irigasi. Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren capaian yang positif dengan peningkatan capaian setiap tahunnya. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten.



Tabel 3. 21 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	59,28	60,31	101,74%	50,8	61,06	120,20%	52,8	53,47	101,26%	58,8	90,93%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 53,43 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 101,26%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 101,74%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 120,20%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 58,8. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 90,93%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Mempertahankan kegiatan operasi pemeliharaan Jaringan Irigasi di setiap daerah irigasi pada setiap tahunnya serta kegiatan pengendalian dan pengawasan melalui sistem e paksi.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

- 1) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam operasi pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- 2) Kurangnya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang dilakukan internal maupun pihak lainnya.



- Alternatif Solusi
 - 1) Dengan menambah anggaran yang diajukan melalui sumber pendanaan lainnya yang sah; dan
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui perekrutan ASN maupun pendidikan formal maupun non formal.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berkontribusi untuk meningkatkan jaringan irigasi sesuai kewenangan Kabupaten.

3.2.15 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Sasaran Strategis 15 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata.

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata

Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan Luas kawasan (176, 46 Ha) dari total 658,57 Ha permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dengan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata.



Tabel 3. 22 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	13,15	13,15	100,00%	17,49	19,48	111,38%	21,83	35,48	162,53%	34,85	101,8%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 35,48 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 162,53%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 111,38%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 34,85. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 101,8%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Kolaborasi pemberdayaan masyarakat; dan
 - 2) Sosialisasi dan penanaman komitmen kepada masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan lingkungan.
 - Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Belum optimalnya dukungan pelayanan dasar sanitasi dan air minum yang layak dan aman;
 - 2) Masih terdapat Kawasan kumuh serta luasnya wilayah;
 - 3) Keterbatasan anggaran; dan
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.



➤ Alternatif Solusi

- 1) Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar;
- 2) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan;
- 3) Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan;
- 4) Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah); dan
- 5) Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dalam pelibatan pemeliharaan lingkungan.

➤ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program kawasan permukiman. Program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan jalan lingkungan dan drainase, Ketersediaan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan Perbaikan sanitasi lingkungan.

3.2.16 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Sasaran Strategis 16 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya kinerja layanan transportasi. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas Kabupaten.



Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas kabupaten Sukabumi adalah tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi atau menghubungkan satu simpul transportasi dengan transportasi yang lainnya dengan menggunakan /memanfaatkan antar moda baik darat maupun ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) berdasarkan dengan jumlah bobot angkutan masing - masing berdasarkan trayek dan lintas yang dilayani. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten.



Tabel 3. 23 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	43	43	100.00%	43	43	100.00%	51	51	100%	75	68%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 51 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 75. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 68%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Membuat draf perhubungan tatanan transportasi lokal di wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai dasar yang mewadahi sistem transportasi di wilayah Sukabumi; dan
 - 2) Penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan transportasi integrasi di wilayah Kab. Sukabumi.
- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Keterbatasan anggaran;



- 2) Sarana prasarana pendukung layanan yang belum memadai;
- 3) Kurangnya SDM yang tersertifikasi;
- 4) Perencanaan sistem jaringan jalan yang belum memadai mengingat cakupan wilayah Kab. Sukabumi yang cukup luas; dan
- 5) Belum terintegrasinya pelayanan antar moda darat dan ASDP.

➤ Alternatif Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya mendorong percepatan pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten Sukabumi;
 - 2) Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara holistik khususnya bidang transportasi;
 - 3) Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program strategis dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - 4) Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) berkontribusi dalam meningkatkan penyediaan pelayanan angkutan umum di wilayah Kabupaten Sukabumi, Program Pengelolaan Pelayaran berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan dermaga di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk melayani ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan).



3.2.17 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

Sasaran Strategis 17 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Sasaran Strategis tersebut memiliki 4 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Profesionalitas ASN, Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja di mana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Tabel 3. 24 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	86	87,98	102,30%	86,5	86,64	100,16%	87,00	87,36	100,41%	88,5	98,7%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IKM yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 87,36 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100,41%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 102,30%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100,16%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 88,5. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 98,7%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada Perangkat Daerah; dan
 - 2) Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam mempersiapkan bahan survei.
 - Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Jumlah responden pada beberapa unit pelayanan yang masih rendah;
 - 2) Kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi SKM;
 - Alternatif Solusi
 - 1) Penguatan kapasitas petugas pelayanan; dan



- 2) Petugas SKM dari masing-masing Perangkat Daerah lebih mensosialisasikan lagi pelaksanaan SKM kepada masyarakat pengguna layanan.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Program tersebut berkontribusi dalam Pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.



Tabel 3. 25 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	52,32	65,9	125,96%	60,2	66,13	109,85%	66,4	66,13	99,59%	78	84,78 %

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IP ASN yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 66,13 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 99,59%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 125,96%, dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja 109,85%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 78, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 84,78%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian PAN RB menetapkan dalam Renstra yaitu indikator kinerja pada tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN Nasional mencapai 80. Jika dibandingkan dengan realisasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 belum mencapai target tersebut atau hanya memiliki capaian kinerja sebesar 82,65%.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Melakukan *Monitoring* dan Pengawasan mulai dari Pimpinan Perangkat Daerah.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

- 1) Kurangnya kesadaran ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat); dan
- 2) Masih terbatasnya jumlah mengikuti Diklat yang diselenggarakan terutama yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.



- Alternatif Solusi
- 1) Untuk menguatkan integritas para pegawai, BKPSDM melaksanakan pembinaan mental aparatur pada para pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
 - 2) Dalam hal pembinaan disiplin ASN, BKPSDM terus meningkatkan penguatan pemahaman terkait disiplin ASN melalui pembinaan berbasis kewilayahan;
 - 3) Dalam fungsi pengawasan kinerja para pegawai BKPSDM melakukan peningkatan pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi kinerja yang disesuaikan berdasarkan aktivitas kerja pegawai; dan
 - 4) Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk menambah penyelenggaraan Diklat;
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program tersebut membantu dalam Meningkatkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi pegawai, kinerja dan disiplin pegawai, dan pelayanan kepegawaian untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan indikator kinerja yang menggambarkan dari pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.



Tabel 3. 26 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100% (Perlu dipertahankan setiap tahun memperoleh WTP)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023



Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren capaian yang konsisten setiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu WTP sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2020 memiliki capaian kinerja 100%, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu WTP. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 100% dengan catatan realisasi kinerja perlu untuk bisa dipertahankan.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal pembinaan kepada pengelola keuangan daerah.

- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Perubahan pengelola keuangan daerah;
 - 2) Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah; dan



- 3) Adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan terutama pada penggunaan aplikasi.
- Alternatif Solusi
- 1) Peningkatan rekonsiliasi data baik pengelolaan keuangan daerah maupun barang milik daerah; dan
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan SIPD.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung di antaranya yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah membantu dalam penyediaan mengenai data laporan realisasi keuangan, penyediaan mengenai data penerimaan dana transfer, penyediaan data pendapatan daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah membantu dalam Penyediaan mengenai data pengelolaan aset daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan *monitoring* pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.



Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Sebagian dokumen perencanaan kinerja terbaru tahun 2023 seperti Perjanjian Kinerja Bupati, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan perjanjian kinerja Kepala Bidang sebagian perangkat daerah belum diunggah pada ESR, sehingga belum diketahui kualitasnya;
- Masih terdapat rumusan perjanjian kinerja kepala dinas yang tidak dilengkapi dengan sasaran, yaitu pada Kepala Dinas Kesehatan
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang yang belum dilengkapi dengan sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, yaitu pada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kepala Bidang Pengendalian, Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang yang belum spesifik, yaitu pada Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Kepala Bidang Pelayanan Izin, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, dengan sasaran yang sama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan dengan indikator persentase koperasi yang berkinerja baik;
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator pada Kepala Bidang yang belum spesifik dan relevan, yaitu pada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dengan sasaran persentase



kelulusan siswa pendidikan nonformal/kesetaraan dengan indikator jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola

- Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.
- Kabupaten Sukabumi memiliki sistem aplikasi Esakip untuk pemantauan atas capaian kinerja unit, dan ELOK untuk penilaian kinerja ASN, namun aplikasi tersebut belum diintegrasikan secara efektif untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Bupati, perangkat daerah hingga individu pegawai;
- Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah belum memuat pengukuran target breakdown triwulanan, seperti pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang tidak selaras menjawab perjanjian kinerja kepala dinas serta belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, seperti pada laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tidak menjelaskan pencapaian persentase koperasi yang berkinerja baik, belum melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang belum sepenuhnya mendalam;



- Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang penyusunannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja yaitu pada Dinas Perhubungan yang analisis keberhasilan indikator tidak berada pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, melainkan pada Bab II Perencanaan Kinerja. Adapun perhitungan capaian kinerja yang belum tepat pada indikator ratio pelayanan lalu lintas laut, angkutan sungai danau, dan penyeberangan yaitu 98,68% yang seharusnya 100%.
- Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan;
- Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum efektif dilakukan oleh Inspektorat, sehingga perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;
- Kabupaten Sukabumi telah memiliki kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal, namun belum sepenuhnya cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Memastikan seluruh dokumen perencanaan berjenjang terbaru diunggah melalui ESR dan website pemerintah daerah, sehingga dapat diakses oleh stakeholders.
- Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan Indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan



indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada kepala dinas dan kepala bidang.

- Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan Perangkat Daerah, serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu.
- Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai.
- Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pengukuran pencapaian kinerja yang di breakdown secara triwulanan.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap perangkat daerah.



- Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Meningkatkan implementasi kebijakan reward and punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik.

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.



Tabel 3. 27 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	66	64,75	98,11%	68	65,95	96,99%	70	66,21	94,59%	76	87,11 %

Sumber: Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja daerah yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 66,21 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 94,59%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 98,11%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 96,99%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 76. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 87,11%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian PAN RB menetapkan dalam Renstra yaitu indikator kinerja pada tahun 2023 % K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP "B" keatas. Jika dibandingkan dengan realisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 maka target tersebut belum tercapai karena masih mendapatkan nilai "B" belum "B" keatas.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

➤ Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja

1) Keseriusan Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; dan



- 2) Adanya keseriusan dari Kepala Perangkat Daerah sebagai *Leading Sector*.
- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
- 1) Belum seluruh Perangkat Daerah mampu mencapai Target Kinerja Daerah;
 - 2) Dalam pelaporan SAKIP Perangkat Daerah belum melaporkan teknis Program dan Kegiatan yang dimaksud; dan
 - 3) Bukti dukung dalam Program dan Kegiatan bisa disesuaikan dengan capaian kinerja Perangkat Daerah masing-masing.
- Alternatif Solusi
- 1) Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Meningkatkan kompetensi penyusun laporan kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 3) Dalam nilai pelaporan kinerja harus disesuaikan dengan teknis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang dimaksud.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung di antaranya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program tersebut memberikan kontribusi yaitu meningkatkan nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah dan meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah.



3.2.18 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

Sasaran Strategis 18 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah meningkatnya inovasi daerah. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan PP Nomor 38 Tahun 2017 dan Permendagri 108 Tahun 2018. Penilaian indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian dari Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Indeks Inovasi Daerah.



Tabel 3. 28 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah

Analisis Capaian Kinerja	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir						Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini			Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun Akhir Periode	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Progres Kinerja
	56	57,49	102,66%	58	57,02	96,64%	58,5	44,76	76,51 %	60	74,6 %

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023



Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 44,76 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 76,51%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 102,66%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 96,64%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 60. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 74,6 %.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

- a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - 1) Penganggaran inovasi daerah penyelenggara pemerintah daerah;
 - 2) Keberlanjutan inovasi di Perangkat Daerah meskipun pergantian jabatan pada instansi pemerintahnya; dan
 - 3) Memberikan kebaharuan yang menjadi terobosan dalam pencapaian pembangunan.



- Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
 - 1) Belum optimalnya budaya inovasi pada penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi; dan
 - 2) Belum optimalnya peran agen inovasi pada perangkat daerah.
- Alternatif Solusi
 - 1) Penyelenggaraan event inovasi daerah di tingkat kabupaten;
 - 2) Mengikutsertakan inovasi tingkat kabupaten ke tingkat provinsi maupun nasional;
 - 3) Mensosialisasikan budaya inovasi secara lebih masif;
 - 4) Menyusun peraturan perundang-undangan Perbup dan Inbup dalam meningkatkan kinerja yang inovatif; dan
 - 5) Mengusulkan penganggaran kegiatan inovasi pada setiap Perangkat daerah yang inovatif.
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program penelitian dan pengembangan daerah. Melalui program ini membantu meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.



3.2.19 Analisis Capaian Kinerja Program yang Menunjang Sasaran Strategis

Tabel 3. 29 Analisis Capaian Kinerja Program yang Menunjang Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	70	70,27	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan Standar	64	72,35	113,05	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
	2. Angka Kematian Ibu (AKI)		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	17	25,22	148,35	
	3. Angka Kematian Bayi (AKB)		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	100	100	100	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	90	90,1	100,11	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,018	0,019	104,38	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	98,06	98,06	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Program	Program	Program	Program	
		Program Perlindungan Perempuan	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0032	0,0063	91	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Program Pemenuhan Hak Anak	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	26	26	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Akurasi Data Gender dan Anak	100	100	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK Sekolah Dasar	102,62	99,6	97,06	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	100,23	96,43	96,21	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	52,34	53,53	102,7	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
			Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	84,9	53,53	110,11	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPД					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses	16,81	15,41	91,6	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	18,91	7,9	41,7	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan (Persen)	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	100	100	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	20	20	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pembinaan Sejarah	Peningkatan Sejarah Lokal dan dibina	20	20	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	20	20	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Layanan Museum terhadap Masyarakat	20	20	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan	
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	29	27,17	93,6	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%	
		Program Pelatihan dan Produktivitas	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,5	6,41	256		Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	100	100	100		Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada Rencana Tenaga Kerja	94	0	0		Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Persen)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh petani (%)	100	100	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih	
			Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh peternak (%)	100	100	100		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh peternak (%)	100	100	100		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	5	232,74	4454,82		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh petani (%)	100	98,6	98,6	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2	2,1	105	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2	2,04	102	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	2	2,05	102,5	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Bidang Perikanan di PUD	2	2,02	101	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	23,37	36,99	116%	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (Persen)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun (%)	4	4	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pertumbuhan investasi sektor agribisnis daerah dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata (persen)	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	8,12	41,27	508,25	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Penanaman Modal	12,99	22,17	170,67	
Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha naik kelas (Persen)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Jumlah IKM Mandiri	9,58	9,58	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	5	5,5	110	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,11	3,3	156,4	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	61	65,96	108,13	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah (Persen)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	40	35,68	89,20	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten (persen)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	67,53	67,53	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,8	53,43	101,19	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata (persen)	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	21,83	35,48	162,53	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio konektivitas kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,24	0,24	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	100	157	157	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
			Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	100	100	100	
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	89	87,52	98,34	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
	Indeks Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Dimensi Kualifikasi ASN	13,4	13,6	101,57	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
			Nilai dimensi kinerja dan disiplin ASN	28	34,96	124,86	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kompetensi ASN	25	20	80	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (opini)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketercapaian mandatory APBD	100	100	100
Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	93			94,15	101,24		
Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	100			100	100		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang mendukung berdasarkan RKPD					Keterangan
		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	12,5	11,41	91,28	Kurang mendukung karena capaian kinerja dibawah 100%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25,52	25,53	100,04	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
			Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26,33	25,36	100,11	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
			Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26,6	26,7	100,38	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah (Poin)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ diimplementasikan	62,5	100	160	Mendukung karena target capaian kinerja sebesar 100% atau lebih Kurang mendukung karena data belum terpenuhi

Sumber: Hasil Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2023



3.3 Analisis Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran persentase penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Kemudian pengukuran efisiensi penyerapan anggaran dilakukan dengan menghitung selisih persentase penyerapan anggaran sesuai alokasi anggaran (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran. Efisiensi serapan anggaran hanya bisa dianggap sebagai efisiensi ketika target kinerja telah tercapai atau memiliki capaian kinerja 100% atau lebih. Jika target kinerja tidak tercapai atau capaian kinerja dibawah 100% maka hanya dianggap sebagai persentase penyerapan anggaran dan tidak terdapat efisiensi penyerapan anggaran.

Efisiensi penyerapan sumber daya anggaran pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi berasal dari efisiensi penyerapan anggaran dari program pembangunan. Berikut merupakan Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran Sasaran Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.



Tabel 3. 30 Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Berdasarkan RKPD	Jumlah (Rp)		Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Serapan Anggaran (%)
				Anggaran	Realisasi		
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	850.000.000	850.000.000	100	0
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	100,53	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	309.777.970.820	296.188.140.331	95,61	4,19
	Angka Kematian Ibu	101,48					
	Angka Kematian Bayi	105,95					
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	715.000.000	618.943.300	86,57	13,43
			Program Perlindungan Khusus Anak	106.080.050	105.903.050	99,83	0,17
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.087.250.000	4.063.053.600	99,41	0,56
			Program Perlindungan Perempuan	50.000.000	49.949.000	99,90	0,1
			Program Pemenuhan Hak Anak	485.000.000	484.790.000	99,96	0,04
			Program Penyediaan Data Gender	110.000.000	106.889.000	97,17	2,83



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Berdasarkan RKPD	Jumlah (Rp)		Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Serapan Anggaran (%)
				Anggaran	Realisasi		
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	131,91%	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.437.630.650	1.406.970.250	97,87	2,13
			Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.284.059.564	2.222.350.640	97,3	2,7
			Program Hubungan Industrial	284.550.000	250.429.500	88,01	11,99
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	20.000.000	13.037.150	65,19	34,81
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan	112,02	Program Pengembangan Kebudayaan	955.000.000	940.915.093	98,53	1,47
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	30.000.000	30.000.000	100	0
			Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	30.000.000	100	0
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	300.000.000	297.459.819	99,15	0,85
			Program Pengelolaan Permuseuman	950.000.000	943.022.154	99,27	0,73
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan	153,85	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	71.973.493.450	68.656.037.730	95,39	4,61
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.745.874.900	11.191.425.674	95,28	4,72
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.573.225.000	1.075.167.745	68,34	21,66



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Berdasarkan RKPD	Jumlah (Rp)		Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Serapan Anggaran (%)
				Anggaran	Realisasi		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.068.965.250	7.824.688.830	96,97	3,03
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	13.491.385.000	13.340.425.400	98,88	1,12
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.587.367.000	1.578.960.400	99,47	2,53
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	50.000.000	50.000.000	100	0
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	111,68	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.545.616.200	1.517.509.020	98,18	1,12
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	585	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.256.182.366	8.881.061.650	95,95	4,05
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	183,25	Program Promosi Penanaman Modal	304.906.000	288.098.980	94,49	5,51
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	386.000.000	333.282.000	86,34	13,66
Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	100	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.956.476.757	17.921.849.575	89,80	10,2
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	2.118.401.200	1.682.863.300	79,44	20,56
			Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	625.000.000	622.236.573	99,56	0,44



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Berdasarkan RKPD	Jumlah (Rp)		Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Serapan Anggaran (%)
				Anggaran	Realisasi		
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan	112,02	Program Pengembangan Kebudayaan	955.000.000	940.915.093	98,53	1,47
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	30.000.000	30.000.000	100	0
			Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	30.000.000	100	0
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	300.000.000	297.459.819	99,15	0,85
			Program Pengelolan Permuseuman	950.000.000	943.022.154	99,27	0,73
Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.973.171.000	3.944.465.982	99,28	0,72
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	100,3	Program Penyelenggaraan Jalan	102.770.900.466	98.869.453.047	96,20	3,8
	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Kewenangan Kabupaten	101,9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	34.714.369.218	33.175.476.768	95,57	4,43
Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	162,53	Program Kawasan Permukiman	7.029.940.084	6.883.731.250	97,92	2,08



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program Berdasarkan RKPD	Jumlah (Rp)		Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Serapan Anggaran (%)
				Anggaran	Realisasi		
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.334.520.910	19.167.780.570	99,14	0,86
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	100,41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	58.053.257.984	57.339.177.931	98,77	1,23
	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	706.442.547.379	661.631.018.996	93,66	6,34
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI				1.399.739.141.248	1.326.817.961.374	94,79	5,21
TOTAL EFISIENSI ANGGARAN				72.921.179.874			

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi, 2023



3.3 Realisasi Anggaran

Berikut merupakan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi:

Tabel 3. 31 Laporan Realisasi Anggaran Program Pembangunan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.998.186.474.766	1.950.801.784.353	47.384.690.413	97,62%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	598.600.696.331	591.108.744.269	7.491.952.062	98,75
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	566.565.000	562.753.400	3.811.600	99,33
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	34.265.182.200	33.941.915.699	323.266.501	99,06
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	149.900.000	132.987.400	16.912.600	88,72
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	300.047.400	298.357.400	1.690.000	99,44
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	309.777.970.820	296.188.140.331	13.589.830.489	95,61
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30.713.919.272	28.694.861.182	2.019.058.090	93,43
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50.000.000	50.000.000	0	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.635.987.200	4.266.411.500	369.575.700	92,03



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	34.714.369.218	33.175.476.768	1.538.892.450	95,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	102.770.900.466	98.869.453.047	3.901.447.419	96,20
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	565.000.000	561.359.000	3.641.000	99,36
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	15.590.000	10.750.000	4.840.000	68,95
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.029.940.084	6.883.731.250	146.208.834	97,92
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	30.673.808.635	29.211.892.200	1.461.916.435	95,23
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	15.873.971.000	15.854.241.000	19.730.000	99,88
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	1.852.891.608	1.743.687.000	109.204.608	94,11
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.638.686.800	6.387.349.500	251.337.300	96,21
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	150.000.000	0	150.000.000	0
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	104.901.236.010	98.283.310.100	6.617.925.910	93,69
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	24.938.272.212	20.697.173.797	4.241.098.415	82,99
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.728.721.150	1.726.337.800	2.383.350	99,86
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	24.249.469.000	23.070.103.617	1.179.365.383	95,14
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	6.447.948.000	6.439.232.890	8.715.110	99,86
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.260.500.000	1.243.419.000	17.081.000	98,64



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6.500.000	975.000	5.525.000	15
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.659.448.000	2.619.695.694	39.752.306	98,51
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.079.300.000	2.067.907.000	11.393.000	99,45
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	865.000.000	852.554.920	12.445.080	98,56
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100.000.000	98.284.000	1.716.000	98,28
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000	13.037.150	6.962.850	65,19
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	117.080.000	108.085.686	8.994.314	92,32
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.284.059.564	2.222.350.640	61.708.924	97,30
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.437.630.650	1.406.970.250	30.660.400	97,87
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	27.920.000	27.759.000	161.000	99,42
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	284.550.000	250.429.500	34.120.500	88,01
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	715.000.000	618.943.300	96.056.700	86,57
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	50.000.000	49.949.000	51.000	99,90
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.087.250.000	4.063.053.600	24.196.400	99,41
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	110.000.000	106.889.000	3.111.000	97,17
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	485.000.000	484.790.000	210.000	99,96
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	106.080.050	105.903.050	177.000	99,83



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	272.350.000	271.546.500	803.500	99,70
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.545.616.200	1.517.509.020	28.107.180	98,18
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90.000.000	89.863.000	137.000	99,85
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	214.000.000	212.285.000	1.715.000	99,20
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	253.561.000	226.822.000	26.739.000	89,45
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	12.000.629.517	9.463.937.779	2.536.691.738	78,86
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	142.375.000	110.854.000	31.521.000	77,86
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	85.175.000	59.217.000	25.958.000	69,52
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.384.250.000	715.412.000	668.838.000	51,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.092.539.000	851.819.060	240.719.940	77,97
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	385.000.000	374.711.975	10.288.025	97,33
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000	397.147.550	2.852.450	99,29
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI	107.000.000	106.851.400	148.600	99,86



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	50.000.000	49.812.300	187.700	99,62
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	84.142.000	83.711.400	430.600	99,49
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MHA, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.000.000	49.977.500	22.500	99,96
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	49.999.900	49.999.900	0	100
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	93.062.500	85.379.550	7.682.950	91,74
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	49.153.300	846.700	98,31
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.297.131.700	10.098.141.250	198.990.450	98,07
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	112.590.000	110.928.500	1.661.500	98,52
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	410.000.000	405.880.900	4.119.100	99
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	172.107.000	168.178.756	3.928.244	97,72
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	35.000.000	34.779.000	221.000	99,37
PROGRAM PENATAAN DESA	229.529.800	228.878.700	651.100	99,72
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	31.000.000	30.970.000	30.000	99,90
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.719.999.300	1.679.591.765	40.407.535	97,65



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.539.799.400	15.527.635.000	12.164.400	99,92
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	574.000.000	573.400.000	600.000	99,90
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	21.332.074.200	21.159.810.472	172.263.728	99,19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	13.674.600.000	13.666.800.000	7.800.000	99,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	19.334.520.910	19.167.780.570	166.740.340	99,14
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.223.101.850	5.219.564.850	3.537.000	99,93
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.973.171.000	3.944.465.982	28.705.018	99,28
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	383.810.000	381.892.000	1.918.000	99,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	375.225.600	372.106.953	3.118.647	99,17
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.704.143.000	2.671.237.037	32.905.963	98,78
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	75.170.000	75.136.000	34.000	99,95
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	87.310.000	87.140.000	170.000	99,81
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	52.520.000	52.475.000	45.000	99,91
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	301.988.000	301.970.500	17.500	99,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.012.000	199.687.000	325.000	99,84



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM	2.118.401.200	1.682.863.300	435.537.900	79,44
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	625.000.000	622.236.573	2.763.427	99,56
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	7.500.000	7.340.000	160.000	97,87
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	304.906.000	288.098.980	16.807.020	94,49
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	119.245.600	115.998.600	3.247.000	97,28
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000	333.282.000	52.718.000	86,34
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.000.000	15.000.000	0	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.275.004.000	1.274.932.500	71.500	99,99
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	955.000.000	940.915.093	14.084.907	98,53
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	26.394.068.991	25.959.919.225	434.149.766	98,36
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	30.000.000	30.000.000	0	100
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	30.000.000	30.000.000	0	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.484.904.000	1.478.810.000	6.094.000	99,59
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	300.000.000	297.459.819	2.540.181	99,15
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	950.000.000	943.022.154	6.977.846	99,27
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	330.000.000	323.288.003	6.711.997	97,97
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.700.069.000	1.670.774.134	29.294.866	98,28



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	200.000.000	198.607.200	1.392.800	99,30
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	113.241.000	109.603.000	3.638.000	96,79
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.068.965.250	7.824.688.830	244.276.420	96,97
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.491.385.000	13.340.425.400	150.959.600	98,88
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	50.000.000	0	100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.587.367.000	1.578.960.400	8.406.600	99,47
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.256.182.366	8.881.061.650	375.120.716	95,95
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.412.000.000	1.377.639.675	34.360.325	97,57
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	75.000.000	74.508.750	491.250	99,35
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.568.718.000	1.559.108.500	9.609.500	99,39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.745.874.900	11.191.425.674	554.449.226	95,28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	71.973.493.450	68.656.037.730	3.317.455.720	95,39
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.573.225.000	1.075.167.745	498.057.255	68,34
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	175.575.000	167.097.000	8.478.000	95,17
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	175.000.000	159.920.000	15.080.000	91,38



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.560.400.100	4.514.925.078	45.475.022	99
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	19.956.476.757	17.921.849.575	2.034.627.182	89,80
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.000.000	99.289.500	710.500	99,29
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	125.000.000	124.564.000	436.000	99,65
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.923.000.000	1.909.015.071	13.984.929	99,27
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	285.000.000	284.188.000	812.000	99,72
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	150.000.000	149.833.900	166.100	99,89
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000	148.980.000	1.020.000	99,32
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	750.000.000	745.414.346	4.585.654	99,39
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	325.000.000	316.455.550	8.544.450	97,37
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	400.000.000	399.264.000	736.000	99,82
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	47.542.370.000	44.029.369.065	3.513.000.935	92,61
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.352.290.000	5.127.852.054	224.437.946	95,81
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.648.579.400	27.362.931.198	285.648.202	98,97
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.306.769.000	1.243.905.558	62.863.442	95,19



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	745.000.000	732.520.188	12.479.812	98,32
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.343.017.900	2.223.936.948	119.080.952	94,92
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	706.442.547.379	661.631.018.996	44.811.528.383	93,66
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.553.619.000	2.551.481.700	2.137.300	99,92
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.600.764.600	4.001.829.664	598.934.936	86,98
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.413.612.400	5.352.104.638	61.507.762	98,86
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.507.450.800	3.491.288.186	16.162.614	99,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.750.616.000	2.705.259.500	45.356.500	98,35
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	341.285.500	325.749.500	15.536.000	95,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	372.820.600	370.661.000	2.159.600	99,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.994.584.650	4.911.946.800	82.637.850	98,35
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	34.924.600	25.471.500	9.453.100	72,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	409.451.600	404.688.500	4.763.100	98,84
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	267.110.000	262.801.800	4.308.200	98,39
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	457.036.600	451.670.500	5.366.100	98,83



Uraian	Jumlah (Rp)		Sisa Serapan	Serapan
	Anggaran	Realisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.080.000.000	1.074.310.400	5.689.600	99,47
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	44.077.792.000	8.468.306.000	35.609.486.000	19,21
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	700.000.000	695.689.000	4.311.000	99,38
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	850.000.000	850.000.000	0	100
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	7.358.814.000	7.358.814.000	0	100

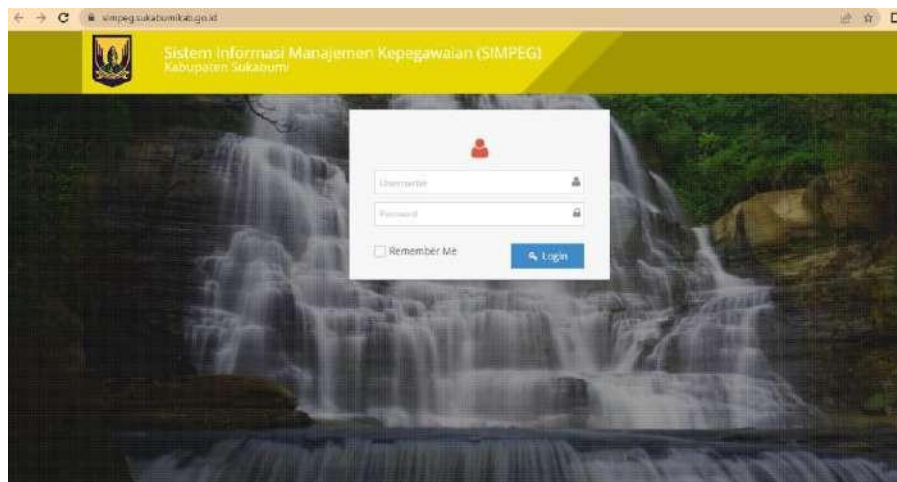
Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi, 2023

3.4 Inovasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Berikut merupakan beberapa inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Aplikasi SIMPEG

SIMPEG atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai aplikasi penyimpanan data kepegawaian ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIMPEG dapat diakses pada <https://simpeg.sukabumikab.go.id/>. Berikut merupakan gambar aplikasi SIMPEG:



Gambar 3. 1 Aplikasi SIMPEG Kabupaten Sukabumi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023

2. Aplikasi Mangkaning

Mangkaning atau Manajemen Kepangkatan ASN Berdaya Saing BKPSDM Kabupaten Sukabumi sebagai aplikasi penghimpun data usulan kenaikan pangkat per periode ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Aplikasi Mangkaning dapat diakses melalui <http://www.mangkaning.id/>. Berikut merupakan gambar aplikasi Mangkaning Kabupaten Sukabumi:

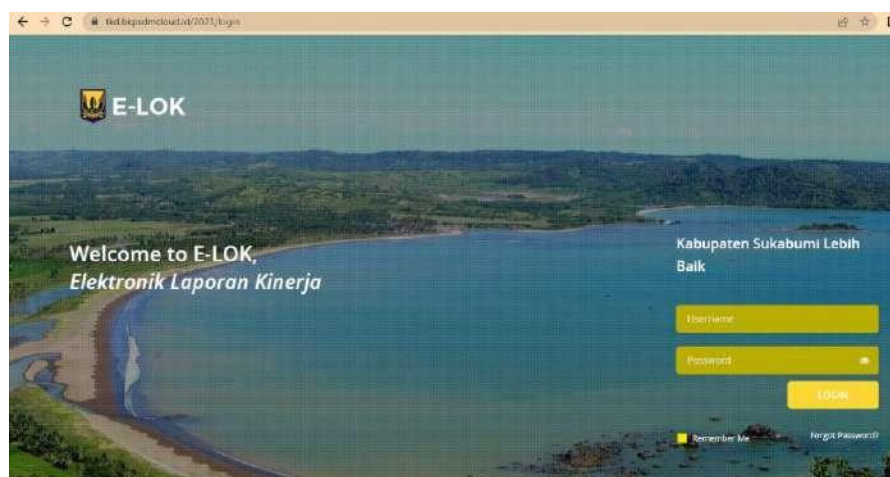


Gambar 3. 2 Aplikasi Mangkaning Kabupaten Sukabumi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023

3. Aplikasi E-Lok

E-Lok Elektronik Laporan Kinerja Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi E-Lok dapat diakses melalui <https://tkd.sukabumikab.go.id/>. Berikut merupakan gambar aplikasi E-Lok Kabupaten Sukabumi:



Gambar 3. 3 Aplikasi E-Lok Kabupaten Sukabumi



*Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukabumi, 2023*

4. Aplikasi SI IBI

Aplikasi SI IBI merupakan Sistem Informasi Izin Belajar bagi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SI IBI dapat diakses melalui <https://bkpsdm.sukabumikab.go.id/siibi/>.

5. Aplikasi SIAP Apel

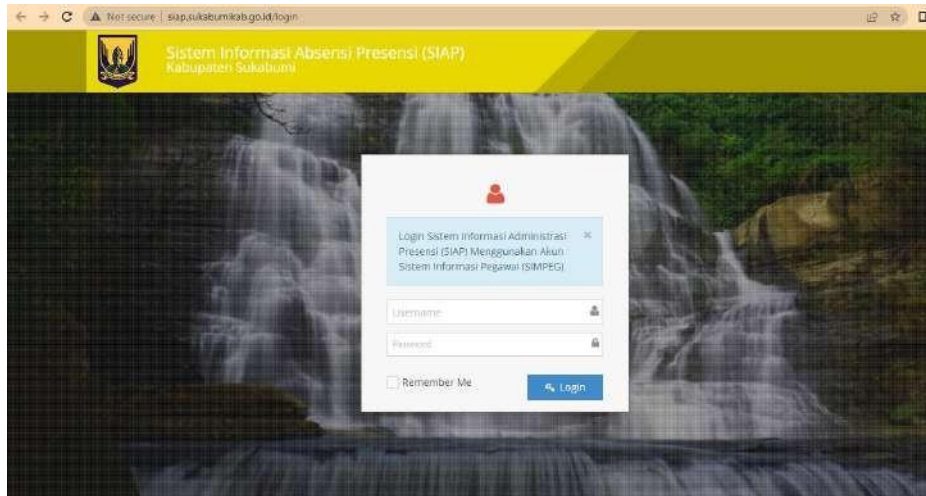
Aplikasi SIAP Apel merupakan Sistem Informasi Absensi Apel bagi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIAP Apel dapat diakses melalui <http://bkpsdmcloud.id/siapapel/pages/login.php>.

6. Aplikasi SIM Tunjangan

Aplikasi SIM Tunjangan merupakan Sistem Informasi Pencairan Tunjangan Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIM Tunjangan dapat diakses melalui <https://tunjangan.sukabumikab.go.id/>.

7. Aplikasi SIAP

Aplikasi SIAP merupakan Sistem Informasi Absensi Presensi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIAP dapat diakses melalui <http://siap.sukabumikab.go.id/login>. Berikut merupakan gambar aplikasi SIAP:



Gambar 3. 4 Aplikasi SIAP Kabupaten Sukabumi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023

8. *Silent Center*

Silent Center Sukabumi *Integrated Labour Employment Center* merupakan inovasi layanan aplikasi berbasis *online* yang memberikan kemudahan fasilitasi ketenagakerjaan, diantaranya pelayanan pelatihan di BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja, Informasi Lowongan Kerja dan program perluasan kesempatan kerja, pengaduan ketenagakerjaan dan layanan pembuatan Kartu Kuning/AK.1. *Silent Center* dapat diakses melalui <https://disnakertrans.sukabumikab.go.id/>. Berikut merupakan gambar *Silent Center* Kabupaten Sukabumi:

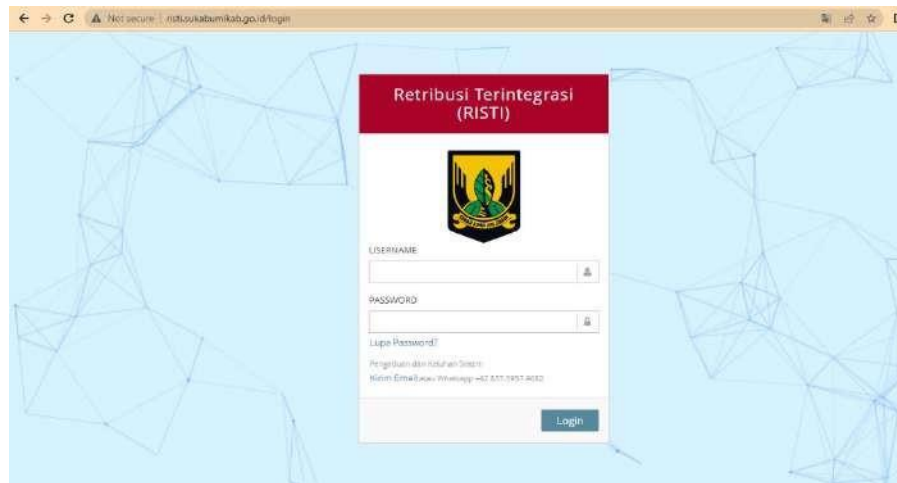


Gambar 3. 5 Website *Silent Center*

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023

9. RISTI

Risti Retribusi Terintegrasi merupakan layanan aplikasi berbasis online dalam Pengelolaan Retribusi dan PAD lainnya di agar dapat mempermudah dalam penerimaan, pembayaran, pencatatan dan penggolongan transaksi serta pelaporannya. RISTI dapat diakses melalui <http://risti.sukabumikab.go.id>. Berikut merupakan gambar aplikasi RISTI Kabupaten Sukabumi:



Gambar 3. 6 Aplikasi RISTI Kabupaten Sukabumi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023

10. POHAGA

POHAGA Pojok Hijau Kaming Tohaga merupakan inovasi yang menerapkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah warga untuk menanam berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat. Sehingga masyarakat bisa bergantung pada hasilnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

11. GEULIS BERSERI WAJAR YA

Inovasi Geulis Berseri Wajar Ya merupakan Gerakan Literasi Menulis dan Berbahasa Inggris, Wadah Belajar dan Berkarya bagi masyarakat khususnya pada anak sebelum masuk Sekolah Dasar.

12. SIMOPI

SIMOPI adalah suatu sistem sekaligus instrumen pengawasan, pengendalian dan pelaporan data yang khusus dirancang untuk memudahkan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap proses penerapan manajemen pemberian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan



kepada pasien oleh para perawat dan bidan di RSUD Sekarwangi.

13. Optimalisasi Aplikasi E-Lok Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Di Kabupaten Sukabumi

Inovasi ini merupakan aplikasi pengumpulan , pengolahan, analisa dan otomatisasi pelaporan yang ditampilkan dalam bentuk Dashboard dalam pengelolaan Kepegawaian seluruh perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi

14. SIDAEM

SIDAEM Sistem Informasi Data Kepegawaian Elektronik Mandiri merupakan Sistem Informasi Data Kepegawaian Elektronik Mandiri merupakan aplikasi berbasis web yang memuat berbagai data kepegawaian, antara lain : profil pegawai, riwayat pendidikan, data keluarga, riwayat jabatan, riwayat golongan/pangkat yang disimpan sebagai data base kepegawaian.

15. Si Kipin Cinta Halisa

Si Kipin Cinta Halisa Pemanfaatan Aplikasi Kios Pintar Untuk Mencerdaskan Dan Meningkatkan Prestasi Siswa Di Kaki Gunung Halimun-Salak merupakan inovasi dalam meningkatkan semangat belajar para siswa di masa pandemi yang dapat berkelanjutan bahkan ketika sistem pembelajaran kembali dilaksanakan secara tatap muka PTM.

16. RESATA

RESATA Relawan Sadar Wisata merupakan inovasi dalam mengimplementasi Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS dengan warga masyarakat baik disekitar maupun



dari luar yang peduli maupun tidak respon sama sekali yang secara agregat mengharapkan penguatan peran masyarakat lokal selaku pelaku usaha atau pelaku pariwisata.

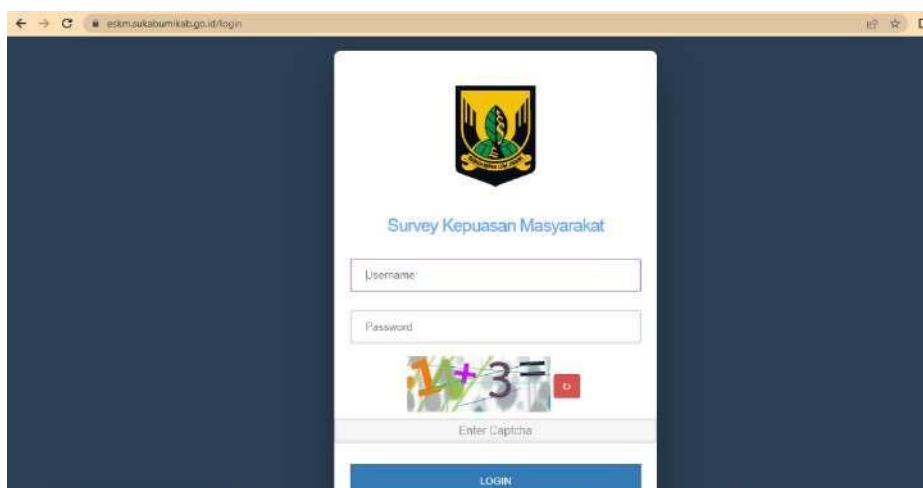
17. Senam Gurilapss

Senam Gurilapss Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai, Seni Budaya Kepada Masyarakat merupakan Gerakan senam irama dan musik, dengan menggabungkan tema yaitu Gunung, Rimba, Lautan, Pantai, Sungai, Seni Budaya. Senam Irama dibuat terstruktur menggabungkan dengan musik tradisional kebudayaan yang ada Kabupaten Sukabumi.

18. Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat

Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menjadi efektif dan efisien serta cepat.

Aplikasi ini dapat diakses melalui <http://eskm.sukabumikab.go.id/login>. Berikut merupakan gambar Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sukabumi:



Gambar 3. 7 Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sukabumi



*Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukabumi, 2023*

19. DesaKugenggam

Inovasi yang dilakukan adalah melakukan pengembangan Fitur Aplikasi SimpelDesa yang sudah ada diantaranya : Menjalankan Fitur Grosir Desa dengan konsep pemberdayaan usaha ekonomi lokal Desa; Menambah Fitur Administrasi Desa berdasarkan Tupoksi Perangkat Desa berdasarkan Permendagri No.47 tahun 2016; Menambah Fitur Sistem Informasi Posyandu SIP dan Laporan Konvergensi Stunting; dan Mengintegrasikan Aplikasi SimpelDesa antara Pemerintah Desa dengan Tingkat Kecamatan.

20. Penggunaan DI-RUAT Digitalisasi Rencana Usulan Aset Terintegrasi Dalam Penyusunan RKBMD Di Kabupaten Sukabumi

Perubahan pelayanan yang semula berbasis kertas/naskah ke sistem pelayanan berbasis digital dan teknologi informatika memiliki keunggulan, di antaranya lebih cepat, efektif, efisien, tersedia back up data, dan dapat dilakukan tanpa harus tatap muka yang memberikan kemudahan dalam prosesnya. Media yang dapat menyimpan data digital memiliki bentuk yang berbeda dengan fisik aslinya. Media tersebut tidak dapat dibaca secara langsung tanpa menggunakan alat bantu pembaca media digital, seperti komputer dan jaringan internet. Dengan didasari oleh permasalahan yang terjadi, maka upaya pemecahannya yang ditawarkan dalam rencana aksi perubahan ini dengan cara membuat model yang inovatif, yakni ; "DIGITALISASI



RENCANA USULAN ASET TERINTEGRASI DI-RUAT”, yang merupakan perubahan tata cara pengusulan RKBMD dari SKPD secara manual ke sistem berbasis aplikasi/digital. Rincian jenis BMD sebagai usulan dari para pengurus barang pada SKPD yang sudah disetujui oleh pimpinan dilanjutkan dengan cara mengisi format RKBMD yang sudah tersedia dalam “DIGITALISASI RENCANA USULAN ASET TERINTEGRASI DI-RUAT”.

21. Klinik Desa Ruang Edukasi Desa Kecamatan Cicantayan
Inovasi Proyek Perubahan adalah Pembuatan Klinik Desa sebagai edukasi Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai perubahan pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum tertib dan terarah menjadi tertib dan terarah sesuai peraturan Perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan.
22. Koperasi Sukabumi Kembangkan Rapat Anggota Tahunan Secara *Online* Kopi Keraton

Koperasi Sukabumi Kembangkan RAT *online* atau KOPI KERATON menjadi sebuah inovasi yang pelaksanaannya tidak bisa lagi ditunda. Idealnya laporan RAT *online* ini terintegrasi dengan data koperasi dan terkoneksi atau menjadi bagian dari sebuah aplikasi atau sistem manajemen koperasi. Namun mengingat belum tersedianya sistem manajemen koperasi dimaksud dan tidak adanya anggaran, untuk langkah awal pelaporan RAT koperasi *online* dibuat sederhana dengan menambahkan fitur khusus dialamat website resmi DKUKM. Selanjutnya dibuat Surat Keputusan Kepala DKUKM tentang Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten Sukabumi Secara *Online* yang ditandatangani pada tanggal 2



Maret 2023. Dalam surat keputusan tersebut dilampirkan juga Standar Standar Operasional Prosedur SOP dilengkapi dengan alur dan tatacara pengisian form laporan RAT *online*.

23. Labu Ceting

Labu Ceting merupakan program esensial di Puskesmas yang lebih mengutamakan pada upaya promotif, preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif.

24. LISDA Layanan Informasi Seputar Dokumen Adminduk

LISDA diharapkan dapat menjadi media yang efektif sebagai sarana informasi pengetahuan masyarakat tentang Adminduk masih kurang dan komunikasi masyarakat bertanya secara langsung tentang keraguan/kesulitan yang dihadapinya ketika mengurus Adminduk serta pengaduan keluhan tentang Dokumen yang tidak selesai-selesai tanpa ada jawaban yang pasti dari permasalahanya.

25. OnLine Farming OLF

OLF dipergunakan untuk mempromosikan ternak yang dijual dipasar ternak yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, serta oleh para pengusaha peternakan maupun pelaku utama peternakan kapan pun dan dimanapun. Penjualan dengan menggunakan sarana OLF media sosial bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi maka dapat diketahui berapa jumlah transaksi dan tujuan jual beli, apabila kemudian transaksi juga memanfaatkan OLF maka manfaat yang diperoleh akan diketahui no handphone dan alamat pembeli. Manfaat lain bagi pelaku usaha peternakan adalah ; para peternak bisa menikmati harga penjualan yang lebih layak karena langsung dengan konsumen serta tanpa jasa



perantara. Manfaat bagi pembeli yakni menghemat waktu dan biaya transaksi.

26. SILOMAS Konsultasi Hallo Puskesmas

SILOMAS Konsultasi Hallo Puskesmas adalah sebuah inovasi dalam Program kegiatan Dokter Masuk Kampung dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah Kesehatan dengan cara menindaklanjuti hasil kunjungan *follow up* melalui pemantauan dari petugas dan konsultasi secara online dari pasien atau keluarga pasien. Melalui SILOMAS akan menjadi mudah bagi masyarakat karena petugas DMK akan melakukan komunikasi, memberikan informasi, edukasi dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan dengan jelas dan cepat. Serta akan ada *follow up* hasil kunjungan pasien untuk memantau sejauh mana kondisi pasien, sehingga dengan memantau *pasca kunjungan* DMK kegiatan dapat terevaluasi dengan baik

27. SIMPELIN Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online

Dokumen Kependudukan yang saat ini sudah didominasi oleh berbagai dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki potensi besar dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan, berbagai layanan sistem elektronik menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya TTE tersertifikasi, dokumen kependudukan dapat dicetak dari rumah., sehingga dengan hadirnya SIMPELIN dapat menjadi fasilitas pelayanan *online* permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara daring. Pemohon/ Masyarakat bisa mengakses layanan SIMPELIN ini melalui alamat website <https://simpelin.dukcapilkabsukabumi.org/> kemudian



mengisi identitas dan memilih layanan administrasi kependudukan yang diperlukan, setelah itu mengupload berkas persyaratan. Petugas pelayanan SIMPELIN akan memeriksa identitas serta memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan persyaratan, apabila berkas lengkap maka permohonan bisa langsung diproses ke tahap selanjutnya, sedangkan apabila tidak lengkap petugas akan menolak berkas permohonan dengan memberikan penjelasan alasan penolakan permohonan yang akan dimunculkan di aplikasi SIMPELIN

28. SI-NAGA BERKAT Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat

Memberikan informasi kepada pengelola tentang jadwal waktu pengusulan KGB dan KP PNS. Dalam perspektif pelayanan digital, maka seluruh data dan informasi PNS direkam dalam media komputer secara elektronik yang memungkinkan dapat diakses dalam android/HP. APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PANGKAT SI-NAGA BERKAT, sebagai media pelayanan administrasi kepegawaian secara digital memiliki dua menu utama yang berbeda, yakni:

- a. menu sistem KGB
- b. menu sistem KP

Pengelolaan data dan informasi PNS secara digital ini dapat menyimpan dokumen dan menginformasikan secara otomatis sesuai batas waktu dan persyaratan untuk diajukan KGB dan KP.

29. SIPENDAWA NITIS Sistem Pendataan Warga Dinamis

Sebuah aplikasi yang didalamnya ada data warga, data ibu hamil dan data bayi yang secara otomatis usia akan



berubah sesuai dengan perubahan hari termasuk usia kehamilan ibu, sehingga ketika akan memasuki usia 9 bulan secara otomatis di aplikasi tersebut akan muncul daftar nama ibu hamil baik yang akan melahirkan secara normal maupun dengan risiko tinggi, termasuk usia bayi mulai dari 0 sampai dengan usia 12 bulan.

30. SIPIRUS

SIPIRUS adalah sistem informasi yang dibuat untuk pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara sistematis yang melayani proses kegiatan pemanfaatan ruang khususnya di Kabupaten Sukabumi yang terintegrasi melalui secara elektronik dan non elektronik. Diharapkan dengan hadirnya SIPIRUS dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Sukabumi. SIPIRUS merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dapat dijadikan alat untuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi.

31. SI-PPITUNG

Bahwa dengan adanya inovasi tentang Sistem Informasi Penghapusan Piutang SI-PPITUNG Pajak Daerah diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan dari proses penghapusan piutang pajak daerah dengan memanfaatkan informasi digital yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah digunakan di antaranya adalah WEBSITE, yang dapat terhubung dengan server di Diskominfo. Selain itu



dapat melalui media sosial, seperti FB, WA dengan jaringan yang terhubung dengan sarana WIFI.

SOLAWAT

“Sistem Layanan Online WA Camat Solawat” sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cicantayan. Pelayanan *online* dengan menggunakan WA ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa hampir semua masyarakat mempunyai HP/Gadget berbasis Android yang ada aplikasi WA.

32. Aplikasi Desa KaMi

Inovasi dalam rancangan aksi ini maka dibuatkan aplikasi android “DESA KaMi”. Adapun platform yang digunakan adalah android, menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman front-end Java, dan back-end dengan MySQL. Aplikasi ini direncanakan dibuat ke dalam 3 modul, yaitu : Dalam aplikasi ini berisi modul :

1. Modul Layanan Digital Desa; modul ini berisi seluruh layanan publik di desa.
2. Modul Profil Desa; modul ini berisi informasi profil desa. dan seluruh kegiatan di desa.
3. Modul Berita Desa; modul ini berisi seluruh kegiatan yang diadakan oleh desa yang bersangkutan yang terintegrasi dengan namadesa.desa.id.

Kemudian aplikasi ini juga terintegrasikan dengan web Pemda Kabupaten Sukabumi di sukabumikab.go.id. Pengelolaan layanan digital desa akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi di desa. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempercepat pelayanan publik di desa.

33. OPA POLI Optimalisasi Pelayanan APM Dan Poliklinik



Inovasi ini sesuai dengan diagnosa organisasi dan kemudian sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi baik di internal maupun eksternal rumah sakit. Adapun platform yang digunakan adalah :

1. Mesin APM dan nomor antrean
2. SDM
3. Surat kontrol / nuncan

Pengelolaan pelayanan ini akan memudahkan bagi petugas dan pasien sehingga tercapainya mutu dan keselamatan pasien di APM dan Poliklinik.

34. SIPANAH Sistem Informasi Pengadaan Tanah

SIPANAH adalah sistem informasi yang dibuat untuk menginformasikan terkait proses pengadaan tanah khususnya di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan hadirnya SIPANAH menjadi informasi yang berguna dan membantu dalam proses pengadaan tanah di Kabupaten Sukabumi. Di dalamnya ada beberapa informasi terkait seluk beluk proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan Menteri ATR/BPN yang baru yaitu Permen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam permen tersebut dijelaskan proses pengadaan tanah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Serta bisa digunakan untuk *monitoring* proses pengadaan tanah di Kabupaten Sukabumi.

PELAWAT Pelayanan Melalui Whatsapp Akta Kematian PELAWAT Pelayanan Melalui Whatsapp Akta Kematian inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayah di Kabupaten Sukabumi dan dibutuhkan untuk



mempermudah proses pelaporan peristiwa kematian bagi penduduk Kabupaten Sukabumi. Inovasi PELAWAT Pelayanan Melalui Whatsapp Akta Kematian menggunakan media whatsapp yang dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi selayaknya mendapatkan kemudahan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian dan untuk meningkatkan cakupan Akta Kematian yang masih rendah.

35. Pembuatan Batik Berdasarkan Ragam Hias dari Kekayaan Tinggalan Arkeologi di Kabupaten Sukabumi

Kegiatan pembuatan batik ini dilakukan dengan mengambil ragam hias berdasarkan temuan gerabah-gerabah yang terdapat di Situs Tugu Gede Cengkuk. Saat ini temuan-temuan gerabah tersebut masih tersimpan di museum lokal Situs Tugu Gede Cengkuk. Kegiatan ini perlu dilakukan, karena dapat menambah kekayaan budaya Kabupaten Sukabumi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat supaya bisa bangga terhadap kekayaan dari hasil kearifan lokal yang ada. Selain itu juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk aktualisasi dalam upaya revitalisasi warisan budaya pada masa lalu yang ada di Kabupaten Sukabumi, akibat kurangnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian budaya, terutama bagi anak muda. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk dapat terlibat dan berpartisipasi aktif melestarikan kebudayaan Sukabumi.

36. IPED Inovasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Untuk mengembangkan sebuah model untuk mendorong produktivitas serta membangun kapasitas



kelembagaan perekonomian Daerah Perumda Agro Sukabumi Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Model dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat melalui sebuah kemitraan yang juga melibatkan Pelaku Bisnis Profesional, dalam menggerakkan mata rantai pengusahaan produk unggulan daerah rantai pasok. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui sebuah fasilitasi inkubasi bisnis yang diharapkan akan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi produksi dan pasca panen, sumber-sumber pembiayaan, input produksi dan pasar. Kegiatan kemitraan usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan kelompok-kelompok rentan yaitu masyarakat miskin, kelompok perempuan, kaum disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kemitraan yang terbangun di antara Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, BUMDesa dan Pelaku Bisnis Profesional diharapkan akan saling memperkuat dan memberi manfaat dalam pengembangan produk unggulan yang dibutuhkan pasar dan berbasis pada sumber daya setempat. Untuk merealisasikan kegiatan kemitraan tersebut dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, dengan sasaran yang jelas dan terukur serta memenuhi ukuran-ukuran kelayakan dari segi teknis, manajemen maupun pembiayaan.

37. Bidan Akta-Ku

Pendampingan Bidan untuk keluarga dan ibu pada fase antenatal kehamilan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester tiga bulan pertama dan kedua, juga 2 kali pada trimester ke tiga sampai dengan intranatal lahiran



dan Postnatal pasca lahiran merupakan tahapan penting awal yang menentukan kualitas hidup dan kehidupan bayi dimasa yang akan datang, selanjutnya diintegrasikan oleh kecamatan dengan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Palabuhanratu, masing-masing Desa/kelurahan serta Kantor Urusan Agama.

38. DorDar Donor Darah

Kegiatan inovasi Pelayanan Publik Palabuhanratu DORDAR, atau Palabuhanratu Donor Darah dilakukan dalam uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Diawali pembangun komitmen dari pengetahuan dan kesadaran yang disertakan dikalangan kelompok Dordar yang dibentuk baik berbasis *community, school/campus*, satuan layanan pemerintah, unit kerja lainnya.
- b. Menentukan *role model* sebagai agen perubahan perilaku dan ajang sosialisasi efektif.
- c. Memunculkan *dignity* dan harga diri dari setiap satuan kelompok donor darah yang dibentuk untuk dapat berkompetisi dan meningkatkan kualitas diri dan kelompoknya yang sejajar dan memiliki kedudukan yang sama bahkan lebih dari kelompok lainnya.
- d. Mengidentifikasi kelompok dan sasaran kelompok.
- e. Mengikat pelaku kelompok dalam sebuah grup khusus.
- f. Melakukan pendataan sasaran dengan isme menyelamatkan pendonor, menyelamatkan yang membutuhkan, dan memberikan kemanfaatan sebagai sebuah kegiatan yang penuh dengan kebaikan.
- g. Berkoordinasi dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia untuk melakukan tahapan sosialisasi pelaksanaan dan pemeliharaan sasaran paska layanan.



h. Evaluasi penyelenggaraan dan menentukan resolusi aktivitas lanjutan perbaikan kedepan.

39. Genteng Gerebeg Stunting

Kolaborasi Bidan, Kader, Aparat Desa, Kecamatan, Keluarga Berencana, Babinsa, Bhabin Kantibmas, PKH, Dalam Penanganan Stunting Sejak Pasangan Usia Subur, Pra Nikah, Sesudah Nikah, Masa Mengandung Dan Paska Melahirkan Melalui *Screening* Pemantauan dan Penanggulangan *Stunting*.

Pengembangan cakupan penanganan *stunting* yang tidak hanya dilakukan setelah lahiran dengan melihat indikasi tinggi badan dan berat badan sasaran sebagai indikasi asupan gizi, namun juga memantau anak sejak dalam kandungan bahkan jauh hari sebelum melakukan pernikahan untuk tidak berisiko menghadirkan keturunan yang *stunting*.

Kegiatannya merujuk kepada ketentuan, strategi, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh supra kecamatan, dan menguatkannya secara pendekatan ke-unik-an wilayah kolaboratif antara politik *will* dengan *affirmative action*. Data yang didapat setiap bulan dari hasil penimbangan sasaran di Posyandu dicatat oleh Bidan Desa dan di rekap di Puskesmas kemudian di oleh oleh Satgas melalui Sekretaris Satgas yaitu UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diolah termasuk data yang didapat dari Tim Pendamping Keluarga untuk sasaran calon pengantin, nifas dan ibu hamil berkategori berisiko yang kemudian oleh camat selaku Ketua Satgas di distribusi ke Desa dan Kelurahan juga ke Forkompimcam, PKH, Dukcapil, TP.PKK, dan lain sebagainya dengan *intention* untuk ditindaklanjuti bersama mitra.



40. RASA KAMI Radio Streaming Asli Kabupaten Sukabumi

Streaming adalah proses pengiriman konten baik audio atau video yang dikirim dalam bentuk *file* terkompres melalui internet, yang kemudian dimainkan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu. *Streaming* sendiri bisa dijadikan alternatif pengiriman informasi radio modern dengan mengandalkan internet tanpa ketergantungan terhadap sistem pemancar konvensional. dan faktanya ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan radio *online* ini dalam mencari informasi berupa berita terkini atau sekedar konten hiburan yang dapat menemani ketika di perjalanan. Radio *streaming* merupakan pengiriman media digital berupa video, suara dan data agar bisa diterima secara terus-menerus *stream*. Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara *real-time* oleh aplikasi pada komputer.

41. SEHATI Sertifikat Halal Gratis

Inovasi dalam rancangan aksi ini sesuai hasil diagnosa organisasi serta fakta yang terjadi dilapangan juga sebagai dukungan atas program pemerintah yang telah meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis SEHATI yang pendaftarannya dapat diakses melalui laman **sehati.halal.go.id** dan SIHALAL. Agar program tersebut dapat diketahui oleh para pelaku usaha ekonomi mikro kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan jumlah para pelaku usaha yang membuat sertifikat halal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi sertifikat halal gratis SEHATI bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

42. SI-KERJA Sistem Informasi Kearsipan Jaringan Aplikasi Sistem

informasi yang memuat tentang kearsipan surat masuk dan keluar. Akan ada back-up data apabila terjadi



kerusakan dan kehilangan surat masuk atau keluar. Sistem dapat menyimpan data sebagai bentuk pengarsipan secara sistematis dengan adanya sistem ini pengelolaan arsip secara manual dapat diatasi.

43. Aplikasi E-IKP (Elektronik Insiden Keselamatan Pasien)

E-IKP merupakan aplikasi berbasis Android sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan insiden keselamatan pasien. Diharapkan dengan sistem ini, pelaporan insiden dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga memungkinkan analisis insiden yang lebih cepat dilakukan oleh Komite Mutu. Ini akan membantu pengembangan program mutu rumah sakit dan meningkatkan pengumpulan data insiden, sehingga pelayanan rumah sakit dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

44. Roasting

Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai lokus prioritas nasional upaya percepatan penurunan stunting sejak 2020. Namun demikian, secara agregat, terjadi tren negatif upaya percepatan penurunan stunting baik merujuk pada data SSGI maupun data E-PPBGM. Pada kedua data tersebut, prevalensi stunting masih naik di tahun 2021.

Dengan target penurunan prevalensi stunting tahunan rata-rata lebih dari 3%, diperlukan langkah extraordinary upaya percepatan penurunan stunting. Untuk itu, Gerakan Rabu Observasi dan Aksi Sinergi Penanganan Stunting (ROASTING) diharapkan menjadi salah satu pendorong upaya extraordinary percepatan penurunan stunting di Kab. Sukabumi.

45. SIPRAHUDarat

Sebelum dibentuknya SIPRAHUDarat, penyediaan data



informasi prasarana perhubungan darat masih bersifat Manual. Dengan dibentuknya SIPRAHUDarat ini penyediaan data informasi prasarana Transportasi menjadi lebih akurat dan akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan Transportasi pada Dinas Perhubungan.

Setelah dibentuk Inovasi SIPRHUdarat dan dilakukan integrasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari database Fasilitas Perlengkapan Jalan yang akan digunakan untuk informasi dan kebutuhan data sebagai pelaporan.

46. SiPod-OL

Diseminasi melalui Streaming Podcast On Location (SiPod-OL) yang merupakan program unggulan sekaligus terobosan yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Citra Lestari 95.7 FM menjadi pilihan strategis bagi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menginformasikan tugas pokok dan fungsinya sekaligus capaian kinerja kepada masyarakat sebagai pengejawantahan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam good governance.

47. MENDA\KAN MAWAR DESA

Ide Inovasi “MENDAKAN MAWAR DESA” (Mencetak Dokumen Kependudukan Mandiri Warga Desa) ini diciptakan oleh Inovator sebagai bentuk kepedulian terhadap penduduk Kabupaten Sukabumi dan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Sukabumi, dengan memanfaatkan aplikasi SIMPELIN (Sistem Informasi Manjaemen Pelayanan Online) berbasis Web yang terlebih dahulu diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan pengurusan Dokumen Kependudukan secara daring/online.



48. PALABUHANRATU GENTING

PALABUHANRATU GENTING (Grebeg stunting) adalah inovasi layanan publik yang dimaksudkan untuk pengurangan prevalensi stunting di kecamatan Palabuhanatu dengan kolaborasi, sinergi, dan terintegrasi. Penggunaan diksi GENTING adalah strategi pemasaran yang sengaja dipilih untuk mendorong ketertarikan orang berkenaan dengan Palabuhanratu Genting. Keingintahuan masyarakat dengan kata-kata genting pada Palabuhanratu genting ini akan terjawab setelah mendapat penjelasan bahwa Genting itu singkatan dari Grebeg Stunting yang dijelaskan selanjutnya dengan kegiatan yang sifatnya kebersamaan, babareungan, sebagai bentuk kegiatan gabungan semua kekuatan untuk mengedukasi dan membantu sasaran dengan potensi yang ada untuk bisa terbebas dari ancaman terpaparnya stunting dan/atau terbebasnya sang buah hati dari kategori stunting sehingga tumbuh kembang secara baik, sehat dan prospektif menjadi generasi unggulan.

3.5 Prestasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Berikut merupakan beberapa prestasi yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Penghargaan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Sukabumi sebagai Juara kedua tingkat provinsi kegiatan pengawasan kearsipan kategori "A" (memuaskan)
2. Predikat Opini WTP Terbaik selama 9 kali berturut turut atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020;
3. Penghargaan Lencana Bhakti Transmigrasi untuk Bupati Sukabumi Atas Kontribusi dan Kerja Keras Dalam Mensukseskan Program Transmigrasi;



4. BSSN Award untuk katagori Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Kabupaten;
5. Penghargaan Kak Seto Award 2023 sebagai Bupati Inspiratif penggerak pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA)
6. Penghargaan Subroto Award Tahun 2023 dengan Kategori Konservasi Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Juara tiga dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2023 atas inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ini, bernama Silent Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center);
8. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat/Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan;
9. Penghargaan OMBUDSMAN RI predikat kepatutan standar pelayanan publik tahun 2023 dengan Opini Penilaian berpredikat Tinggi dengan Kategori Hijau;
10. penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Untuk Kategori Nindya Tahun 2022
11. Sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan, penghargaan diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI); dan
12. Penghargaan Juara Ke-III Lomba Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kategori Kabupaten Tahun 2023;
13. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kategori BAIK. Penghargaan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023 yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap Pencapaian Sasaran Strategis sehingga berdampak terhadap tingkat ketercapaian visi dan misi pada tahun 2023. Penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 juga merupakan sebuah pertanggungjawaban pencapaian visi Bupati Sukabumi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 4 misi yakni: Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing; Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan; Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Realisasi pencapaian visi dan misi Bupati Sukabumi dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian pula pada tahun 2023 ini,



Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi tahun 2023. Secara umum capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan daripada capaian tahun 2021 meskipun terdapat indikator yang menurun. Meskipun beberapa indikator mengalami penurunan capaian kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



4.2 Langkah Strategis

Tabel 4. 1 Simpulan Umum dan Langkah Strategis Perbaikan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100,09%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan; 2. Penambahan jumlah dan kompetensi personal khususnya untuk melakukan sosialisasi, mediasi, diseminasi, dan pembinaan kerukunan umat beragama yang terbagi di setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi; dan 3. Penggunaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan survey.
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	104,48%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2. Pemerintah idealnya meningkatkan anggaran program pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi sebesar 3% dari total anggaran sektor Kesehatan; dan 3. Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat. 4. Menganggarkan logistik terutama SPM ibu hamil dan melahirkan serta bayi baru lahir; dan 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di Rumah Sakit.
	Angka Kematian Ibu (AKI)	104,81%	Target Kinerja Tercapai	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	105,95%	Target Kinerja Tercapai	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta perempuan terhadap sektor pendidikan dan ekonomi; 2. Meningkatkan peran gender dalam pembangunan. 3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pedoman penyusunan anggaran yang responsif gender; dan 4. Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	98,65%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata; 2. Melakukan pengadaan P3K melalui BKPSDM dan Kementerian; 3. Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dalam upaya peningkatan aksesibilitas penunjang urusan sekolah dan pendidikan; 4. sosialisasi/promosi pendidikan kepada masyarakat, terutama berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang belum menamatkan Pendidikan; dan 5. Kerjasama dengan pihak penyelenggara pesantren tradisional, agar juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (PKBM).
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	99,68%	Target Kinerja Tidak Tercapai	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	96,15%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan terhadap PSKS untuk membantu dalam penanganan PMKS dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 2. Optimalisasi dan penguatan PUSKESOS dalam melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS dan PMKS di desa; dan 3. Berkoordinasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial dalam penyempurnaan data DTKS dan PMKS.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	112,02%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah; dan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemajuan budaya terutama pengamanan cagar budaya.
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	131,91%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan kegiatan padat karya dari unsur anggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja; 3. Memperluas kesempatan kerja; 4. Melakukan pembinaan lembaga pelatihan swasta; 5. Kuota pelatihan BLK diperbanyak; dan 6. Melakukan Koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi terhadap stakeholder melalui Silent Centre.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan	153,85%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan; 2. Melakukan Revisi Kebijakan mengenai proteksi pengalihan lahan pertanian produktif; 3. Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/ permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan; 4. Sinergitas lintas sektoral termasuk pihak swasta dan stakeholder.
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	111,68%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman/ pembiasaan gizi seimbang/ Triguna Makanan (sumber tenaga, sumber zat pembangunan, sumber zat pengatur); 2. Kampanye/ sosialisasi konsumsi makanan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman); dan 3. Sinergitas Lintas Sektoral termasuk pihak swasta dan pemangku kepentingan.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	585%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang pariwisata; 2. Membenahi peraturan yang menunjang urusan terkait destinasi wisata; 3. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder guna memajukan dan mengembangkan destinasi wisata; 4. Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam kota sebagai sarana promosi;



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis dan Pariwisata	183,25%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin mengadakan bimbingan teknis tentang sistem OSS RBA (perizinan berbasis risiko); 2. Melakukan Pemantauan Secara Berkala dan Terjadwal Ke Pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan; 3. Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam kota sebagai sarana promosi;
Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	100%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan daerah (Perbup/Perda) terkait pengembangan dan perlindungan hak IKM; 2. Adanya kemudahan akses pembiayaan di lembaga keuangan atau perbankan; 3. Adanya lembaga pemberdayaan IKM; 4. Pelatihan dan pendidikan Bimtek bagi para pelaku usaha; 5. Melakukan kerja sama/kemitraan; dan 6. Membantu akses permodalan.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	95,95%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan instansi terkait (seperti Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang); 2. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pengendalian tutupan lahan dan pengendalian kualitas air sungai; dan 3. Menambah titik-titik sampel dalam pengujian kualitas air sungai dan udara ambien.
Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah	100%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskominfo bekerja sama dengan Stakeholder penyedia layanan internet dan Pemerintah Desa untuk mengatasi lokasi blankspot di Kabupaten Sukabumi; dan 2. Evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan koordinasi antar PD supaya dapat berpartisipasi dalam tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor.
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten	100,3%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan penambahan anggaran yang diajukan melalui sumber pendanaan lain selain APBD; dan 2. Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum melakukan kegiatan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan Jembatan dan survey kondisi jalan jembatan untuk tercapainya Presentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui perekrutan ASN maupun pendidikan formal maupun non formal.
	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	101,26%	Target Kinerja Tercapai	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	162,53%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan dasar; 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan; 3. Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan; 4. Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah); dan 5. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dalam pelibatan pemeliharaan lingkungan.
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	100%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya mendorong percepatan pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten Sukabumi; 2. Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara holistik khususnya bidang transportasi; 3. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program- program strategis dapat dilaksanakan dengan baik; dan 4. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,41%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas petugas pelayanan; 2. Petugas SKM dari masing-masing Perangkat Daerah lebih mensosialisasikan lagi pelaksanaan SKM kepada masyarakat pengguna layanan.
	Indeks Profesionalitas ASN	99,59%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menguatkan integritas para pegawai, BKPSDM melaksanakan pembinaan mental aparaturnya pada para pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah; 2. Dalam hal pembinaan disiplin ASN, BKPSDM terus meningkatkan penguatan pemahaman terkait disiplin ASN melalui pembinaan berbasis kewilayahan; 3. Dalam fungsi pengawasan kinerja para pegawai BKPSDM melakukan peningkatan pengukuran kinerja pegawai pada aplikasi kinerja yang disesuaikan berdasarkan aktivitas kerja pegawai; dan 4. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk menambah penyelenggaraan Diklat;
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	100%	Target Kinerja Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan rekonsiliasi data baik pengelolaan keuangan daerah maupun barang milik daerah; dan 2. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan SIPD.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Simpulan Capaian Kinerja 2023		Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja
		Capaian Kinerja	Statis Capaian Kinerja	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	94,59%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah; 2. Meningkatkan kompetensi penyusun laporan kinerja Perangkat Daerah; dan 3. Dalam nilai pelaporan kinerja harus disesuaikan dengan teknis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang dimaksud.
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	76,51%	Target Kinerja Tidak Tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan event inovasi daerah di tingkat kabupaten; 2. Mengikutsertakan inovasi tingkat kabupaten ke tingkat provinsi maupun nasional; 3. Mensosialisasikan budaya inovasi secara lebih masif; 4. Menyusun peraturan perundang-undangan Perbup dan Inbup dalam meningkatkan kinerja yang inovatif; dan 5. Mengusulkan penganggaran kegiatan inovasi pada setiap Perangkat daerah yang inovatif.

Sumber: Data diolah penulis, 2023



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja APBD Murni Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM
Jabatan : BUPATI SUKABUMI

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palabuhanrata, Februari 2023
BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI, MM





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing				
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,20	Poin
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,45	Tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI)	83,00	Per 100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,20	Per 1.000 KH
3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,78	Poin
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	Tahun
5.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,75	Persen
6.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	21,55	Persen
7.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,75-10,75	Persen
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan				
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	2,73	Persen
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,60	Poin
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5 - 1	%
10.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	3,0	%
11.	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	2,50	%
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,41	Poin
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah				
13.	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	82,12	%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
	informatika daerah			
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	67,53	%
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,80	%
15.	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	21,83	%
16.	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	51	%
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel				
17.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	Poin
		Indeks Profesionalitas ASN	66,40	Poin
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	Opini
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	70,00	Poin
18.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,50	Poin

Belanja langsung

Rp. 4.237.001.298.442,00

Palabuhanratu, Februari 2023
BUPATI SUKABUMI,



Dr. H. MARWAN HAMAMI, MM



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM
Jabatan BUPATI SUKABUMI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palabuhanratu, November 2023
BUPATI SUKABUMI,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing				
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerakunan Umat Beragama	75,20	Poin
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,45	Tahun
		Angka Kematian Ibu (AKI)	83,00	Per 100 000 KJI
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,20	Per 1.000 KJI
3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,78	Poin
4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,43	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42	Tahun
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,75	Persen
6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan	21,55	Persen
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,75-10,75	Persen
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan				
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	2,73	Persen
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,60	Poin
9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5 - 1	%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	3,0	%
11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	2,5	%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,41	Poin



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah				
13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	82,12	%
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	67,53	%
		Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	52,80	%
15	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	21,83	%
16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	51	%
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel				
17.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	Poin
		Indeks Profesionalitas ASN	66,40	Poin
		Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	Opini
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	70,00	Poin
18.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	58,50	Poin

Belanja langsung Rp. 4.351.855.615.388,00

Palabuhanratu, November 2023
BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM



Lampiran 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	4.387.206.611.054,00	4.305.177.242.242,00	99,27	4.107.351.175.294,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	685.459.759.768,00	754.367.741.699,00	110,05	712.538.704.914,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	294.927.000.000,00	296.621.618.659,00	100,57	296.141.722.905,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	17.155.360.000,00	15.734.711.666,00	91,72	12.360.214.882,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.166.150.000,00	11.204.895.847,00	100,35	10.552.783.392,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	362.211.249.768,00	430.806.515.527,00	118,94	393.481.003.765,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.655.457.398.886,00	3.576.088.303.929,00	97,83	3.342.335.308.273,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	2.732.826.429.267,00	2.681.137.053.322,00	98,11	2.540.349.949.721,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	230.133.406.650,00	171.382.211.168,00	74,47	211.289.824.305,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	1.598.829.380.000,00	1.617.720.835.948,00	101,18	1.484.130.031.700,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	903.863.642.617,00	892.034.506.206,00	98,69	844.930.093.666,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	458.599.894.000,00	458.599.894.000,00	100,00	410.991.005.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	11.838.424.000,00	11.838.424.000,00	100,00	9.204.713.000,00
4.2.02.04	Dana Desa	446.761.470.000,00	446.761.470.000,00	100,00	401.786.292.000,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	464.031.075.619,00	436.350.916.607,00	94,03	390.994.353.852,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	305.383.252.409,00	330.976.916.827,00	93,13	310.281.609.437,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	158.647.823.210,00	105.374.000.000,00	66,59	80.712.744.415,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	52.677.161.807,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	46.349.453.000,00	24.721.136.614,00	53,34	52.677.161.807,00
5	BELANJA	3.843.579.855.022,00	3.690.146.373.441,00	96,01	3.426.416.090.112,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.321.049.194.961,00	3.197.260.442.888,00	96,27	2.964.323.049.903,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.461.308.359.421,00	1.433.686.572.208,00	98,11	1.452.229.602.357,00
5.1.02	Belanja Barang	1.597.196.756.014,00	1.545.035.703.254,00	96,77	1.306.185.335.150,00
5.1.05	Belanja Hibah	246.344.079.526,00	201.738.167.426,00	81,89	191.713.112.396,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00	100,00	14.195.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	506.957.125.536,00	485.582.093.280,00	95,78	452.408.956.353,00
5.2.01	Belanja Tanah	11.225.439.017,00	8.564.932.779,00	76,39	14.284.613.698,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	114.307.103.950,00	109.205.998.235,00	95,57	120.048.106.492,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	239.507.751.256,00	230.498.623.069,00	96,23	140.149.325.439,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.809.319.216,00	90.543.039.151,00	95,50	175.252.407.714,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	47.007.512.097,00	46.799.800.047,00	99,56	2.674.500.950,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	15.573.034.525,00	7.303.837.273,00	46,90	9.684.083.856,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	15.573.034.525,00	7.303.837.273,00	46,90	9.684.083.856,00
6	TRANSFER	686.433.048.334,00	678.827.589.608,00	98,89	631.158.912.965,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	686.433.048.334,00	678.827.589.608,00	98,89	631.158.912.965,00
6.1.01	Bagi Hasil Pajak	35.864.878.600,00	32.616.889.292,00	90,94	37.773.662.399,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	650.568.169.734,00	646.210.700.316,00	99,33	593.385.250.566,00
	SURPLUS / DEFISIT	(142.746.291.702,00)	(13.796.720.807,00)	0	49.976.172.217,00
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	177.996.860.621,54
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	183.981.291.702,00	183.981.291.702,54	100,00	177.996.860.621,54
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.235.000.000,00	41.242.369.751,00	100,02	43.991.741.136,00
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.369.751,00	0	7.794.371,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	41.235.000.000,00	41.235.000.000,00	100,00	43.983.946.765,00
	PEMBIAYAAN NETTO	142.746.291.702,00	142.738.921.951,54	99,99	134.005.118.485,54
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	128.042.201.144,54	0	183.981.291.702,54



Lampiran 4 Undangan Rapat Desk Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Siliwangi Nomor 10, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364 Telepon (0266) 433611 Faksimil (0266)433614 – 221017 – 435006 Laman www.sukabumikab.go.id, Pos-el setda@sukabumikab.go.id</p>
<p>Palabuhanratu, 22 Februari 2024 M 12 Sya'ban 1445 H</p>	
Nomor	: 000.8.6.3/1437/Org/2024
Sifat	: Penting
Lampiran	: 1 berkas
Hal	: Undangan Desk
Yth.	Kepala Perangkat Daerah (Terlampir) di - Tempat
<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan menyampalkannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Bapak/Ibu menugaskan 1 (satu) orang pejabat yang menangani perencanaan dan evaluasi untuk dapat hadir Desk Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan membawa bahan sesuai IKU terlampir, yang dilaksanakan pada :</p> <p>Hari/tanggal : Senin, 26 Februari 2024 Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai Acara : Desk Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Tempat : Spark Forest Adventure Jalan Alternatif Nagrak Cibadak</p> <p>Demikian disampaikan, agar dapat hadir tepat pada waktunya.</p>	
<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><p>Ditandatangani secara elektronik oleh : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ADE SURYAMAN, SH., MM.</p></div>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Sukabumi2. Wakil Bupati Sukabumi	
	<p>Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</p>



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 10, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364
Telepon (0266) 433611 Paksimil (0266) 433614 – 221017 - 435006
Laman www.sukabumikab.go.id Pos-el sctda@skabumikab.go.id

Palabuhanratu, 29 Januari 2024 M
17 Rajab 1445 H

Nomor : 000.6.6.3/776/Org/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Penyusunan LKJ dan PK

Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Terlampir)
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/AA.05/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melaksanakan Pra-Evaluasi SAKIP Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, Perangkat Daerah terlampir agar segera menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja (PK) Murni Tahun 2024 beserta laporan PK Berjenjang (dilengkapi peta / matrik PK).

Adapun Dokumen sebagaimana tersebut di atas, agar disampaikan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy*, paling lambat tanggal 13 Februari 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung melalui Wa. 057722570676 (a.n Iman Yuhansyah, S.H). Demikian di sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukabumi,



Tembusan kepada :
1. Bupati Sukabumi
2. Wakil Bupati Sukabumi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

 **KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7396381 - 7396382, FAKSIMILE (021) 7396323, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : B/203/AA.05/2023 27 November 2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
di
Pelabuhanratu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kabupaten Sukabumi dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) membenarkan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.



Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kabupaten Sukabumi telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu indikator kinerja perangkat daerah;
- b. Melengkapi formulasi perhitungan pada IKU perangkat daerah;
- c. Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kabupaten Sukabumi;
- d. Melakukan sosialisasi penyusunan laporan kinerja ke perangkat daerah;
- e. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dengan melakukan bintek evaluasi SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Sukabumi menunjukkan nilai sebesar **66,21** dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,69	22,73
b. Pengukuran Kinerja	30	16,05	16,14
c. Pelaporan Kinerja	15	11,36	11,41
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,85	15,93
Nilai Hasil Evaluasi	100	65,95	66,21
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Sukabumi tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Kabupaten Sukabumi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian kinerja, RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kabupaten Sukabumi telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Kabupaten Sukabumi juga sudah menyusun pohon kinerja pada level Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi



catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut

- a. Sebagian dokumen perencanaan kinerja terbaru tahun 2023 seperti Perjanjian Kinerja Bupati, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan perjanjian kinerja Kepala Bidang sebagian perangkat daerah belum diunggah pada ESR, sehingga belum diketahui kualitasnya;
- b. Masih terdapat rumusan perjanjian kinerja kepala dinas yang tidak dilengkapi dengan sasaran, yaitu pada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang yang belum dilengkapi dengan sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, yaitu pada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kepala Bidang Pengendalian, Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang yang belum spesifik, yaitu pada Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Kepala Bidang Pelayanan Izin, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, dengan sasaran yang sama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan dengan indikator persentase koperasi yang berkinerja baik;
- e. Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator pada Kepala Bidang yang belum spesifik dan relevan, yaitu pada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dengan sasaran persentase kelulusan siswa pendidikan nonformal/kesetaraan dengan indikator jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola;
- f. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.

2) Pengukuran Kinerja

Kabupaten Sukabumi dan seluruh perangkat daerah telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya. Seluruh perangkat daerah juga telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi



perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sukabumi memiliki sistem aplikasi Esakip untuk pemantauan atas capaian kinerja unit, dan ELOK untuk penilaian kinerja ASN, namun aplikasi tersebut belum diintegrasikan secara efektif untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Bupati, perangkat daerah hingga individu pegawai;
- b. Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- c. Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah belum memuat pengukuran target *breakdown* triwulanan, seperti pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3) Pelaporan Kinerja

Kabupaten Sukabumi telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan laporan kinerja pada perangkat daerah. LPPD telah dipublikasikan secara umum melalui website pemda. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang tidak selaras menjawab perjanjian kinerja kepala dinas serta belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, seperti pada laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tidak menjelaskan pencapaian persentase koperasi yang berkinerja baik, belum melengkapi perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang belum sepenuhnya mendalam;
- b. Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang penyusunannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja yaitu pada Dinas Perhubungan yang analisis keberhasilan indikator tidak berada pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, melainkan pada Bab II Perencanaan Kinerja. Adapun perhitungan capaian kinerja yang belum tepat pada indikator ratio pelayanan lalu lintas laut, angkutan sungai danau, dan penyeberangan yaitu 98,68% yang seharusnya 100%.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2023 pada perangkat daerah telah mengacu pada



Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan;
- b. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum efektif dilakukan oleh Inspektorat, sehingga perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;
- c. Kabupaten Sukabumi telah memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, namun belum sepenuhnya cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh dokumen perencanaan berjenjang terbaru diunggah melalui ESR dan website pemerintah daerah, sehingga dapat diakses oleh stakeholders;
- b. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada kepala dinas dan kepala bidang;
- c. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan Perangkat Daerah, serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- e. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai;
- f. Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pengukuran pencapaian kinerja yang di *breakdown* secara triwulanan;
- g. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian

kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- h. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah;
- i. Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- j. Meningkatkan implementasi kebijakan *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Sukabumi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Bupati Sukabumi.



Lampiran 7 Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama

Simulasi Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama																
RESPONDEN	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9	Unsur 10	Unsur 11	Unsur 12	Unsur 13	Unsur 14	Unsur 15	Total Nilai Unsur
RESKA	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
MOH DAENUR	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	2
HENDI YANSAH	1	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	5	3	4	
RIMA YANTI	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	
NOVIA FITRIYANI	4	2	3	2	3	4	4	4	4	5	5	2	4	4	4	
DEA	2	4	4	4	2	5	2	4	4	3	4	4	4	4	3	
SEVLI MARINA	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	
ASTRI ARGITA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ALDI NOVALDI	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	4	1	4	
Itmi Hamada	5	4	4	4	5	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	
Amet Maulidina Fauzi	5	4	4	4	5	3	3	5	4	5	5	4	5	5	4	
Asri Lestari	5	4	4	5	1	3	5	5	5	5	4	3	3	4	4	
Siti Juniah	5	4	4	5	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	1	
Leli Agustian	5	4	4	4	2	3	5	5	5	5	5	4	4	5	3	
Shania Nasvasiva	5	4	5	5	3	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	
Agni Tsaqila	4	3	5	5	1	4	5	5	3	5	4	4	5	5	1	
Nayla Nurul Azhari	4	3	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	5	5	3	
Putri Avrilia Rimasya	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	
Olifia Febriladani	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	5	2	5	4	1	
laily nurhasanah	5	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Amet Sri Aproani	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	
Keyza Ameldanti Buti	5	4	4	4	5	3	4	5	4	5	5	4	5	4	2	
Nur Anggis Triani	3	1	1	3	1	1	1	3	2	2	2	4	1	4	2	
Enisah Hanipah	5	3	4	4	3	4	3	4	4	5	5	3	4	4	3	
Sabrina Supriadi	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	
Sabrina Supriadi	1	3	3	1	1	1	3	1	1	2	3	4	1	1	3	
Pebriyani	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	3	
Natasha Nurlani Putri	4	4	4	4	5	2	5	5	4	5	5	4	4	4	3	
Anisa Siti Rahmawaty	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	
Anisa	2	2	2	2	2	2	4	3	2	2	4	4	4	2	4	
Rahma Aliana Khairi	5	5	4	5	4	5	4	5	2	5	5	5	5	5	4	
Syifa Saffitri	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	
Neng Maryam	4	2	4	4	5	5	4	4	1	4	4	4	4	5	2	
Revalina	4	3	3	4	5	4	5	4	4	2	4	5	4	2	4	
Nuryani	4	2	4	4	5	5	4	4	1	4	4	4	5	5	2	
Al Lisna	5	4	5	4	4	4	1	5	4	5	5	4	4	5	2	
Salwa Nazma	5	5	5	4	4	4	1	5	4	5	5	4	4	5	2	
Silpia	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	
Glissa Amalia Putri	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	2	
Elsa Sri Mulyanti	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	
Total Per-unsur	162	135	152	150	132	145	140	162	137	165	172	155	165	165	121	2258

Total Nilai Unsur	=	2258
Jumlah Responden	=	40
Jumlah Unsur	=	15
Nilai Unsur Tertinggi	=	5
INDEKS KUB	=	75,27

Indeks KUB dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks KUB} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{jumlah pernyataan (skor pernyataan ke- } i \text{)}}{\text{total pernyataan} \times \text{Nilai Unsur Tertinggi}} \times 100$$

Berdasarkan rumus KUB, Diperoleh nilai Indeks KUB sebagai berikut:

$$\text{INDEKS KUB} = \frac{8077}{150 \times 15 \times 5} \times 100 = 75,27$$

Acuan Penentuan Predikat Berdasarkan Nilai Rentan		
Rentan Nilai (Inklusif)	Skala 1-5	Predikat
0-20	0-1	Sangat Rendah
21-40	1-2	Rendah
41-60	2-3	Sedang
61-80	3-4	Tinggi
81-100	4-5	Sangat Tinggi

PENGHITUNGAN INDEKS = $\frac{\text{Total Nilai unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur} \times \text{Nilai})}$



**Lampiran 9 Hasil Pengukuran Angka Harapan Hidup (AHH),
Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Tingkat
Pengangguran Terbuka**

Statistik Kunci, 2021–2023 Key Statistics, 2021–2023				
Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	2.761,48	2.775,31	2.802,40
Laju Pertumbuhan Penduduk ² /Population Growth ²	%	1,32	1,04	1,02
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	71,21	74,40	74,65
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	99,79	99,53	99,17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{1,3} <i>Labour Force Participation Rate-LFPR^{1,3}</i>	%	64,93	69,11	67,75
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{1,3} <i>Unemployment Rate-UR^{1,3}</i>	%	9,51	7,77	7,32
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	ribu/thousand	194,40	186,30	178,71
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People⁴</i>	%	7,70	7,34	7,01
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index⁵</i>	–	67,07	68,87	69,71



**Lampiran 10 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan PDRB sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Lapangan Usaha <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,13	1,80	2,15	5,40	4,24



Lampiran 11 Hasil Pengukuran Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2022	2023
JAWA BARAT	8,78	8,83
Bogor	8,34	8,37
Sukabumi	7,11	7,33
Cianjur	7,2	7,22
Bandung	9,08	9,1
Garut	7,83	7,84
Tasikmalaya	7,73	7,96
Ciamis	8	8,09
Kuningan	7,88	7,89
Cirebon	7,4	7,64



Lampiran 12 Hasil Pengukuran Harapan Lama Sekolah (HLS)

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
	2022	2023
JAWA BARAT	12,62	12,68
Bogor	12,5	12,64
Sukabumi	12,25	12,38
Cianjur	12,01	12,03
Bandung	12,71	12,73
Garut	12,15	12,16
Tasikmalaya	12,59	12,63
Ciamis	14,28	14,29
Kuningan	12,24	12,26
Cirebon	12,28	12,41



Lampiran 13 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


BAB IV KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 selama Bulan November 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik-Memuaskan dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,36. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi menunjukkan kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 83 Perangkat Daerah dan Perumda telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Terdapat 1 Perangkat Daerah dan 2 Perumda yang belum menyampaikan laporan tahun 2023 ini.
3. Dari seluruh PD yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Palabuhanratu, Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,


[Signature]
SUDIBURYAMAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670815 199603 1 002



Lampiran 14 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP <small>Komplek Perkantoran Jajaway Jalan Jend. Sudirman, Palabuhanratu-Sukabumi 43364 Telepon (0266) 436428 Faksimili (0266) 436427 Laman : dlh.sukabumikab.go.id Pos-el: bh@sukabumikab.go.id</small>					
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN					
KABUPATEN : SUKABUMI URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP PELAKSANA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PADA RPJMD 2021-2026					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
1					
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan					
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1					
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan					
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,41	64,68
Kategori IKLH : Sedang karena berada pada Rentang Nilai 50-70					
Palabuhanratu, 30 Januari 2024 Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi  Ir. BAMBANG WIDYANTORO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19670413 199901 1 001					



Lampiran 15 Hasil Pengukuran Rasio Konektivitas Kabupaten

3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah (Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi) :

a. Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 sebanyak 51% :

- Nilai Konektivitas Target RPJMD Tahun 2023 sebanyak 51%

- Nilai Konektivitas Realisasi RPJMD Tahun 2023 sebesar 51%

- IK 1 (Bobot Trayek Angkutan Umum/Darat dengan Bobot 70%) =

$$\frac{\text{Jumlah Lintasan Trayek Beroperasi (Rencana)} \times 1}{66} = \frac{40}{66} \times 1 = 60,60$$

Jumlah Lintasan Trayek Kebutuhan

$$= 60,60 \times 70\% \text{ (Bobot Angkutan Umum/Darat)}$$

$$= 42 \%$$

- IK 2 (Bobot Trayek ASDP dengan Bobot 30%) =

$$\frac{\text{Jumlah Lintasan Trayek Beroperasi (Rencana)} \times 0,5}{10} = \frac{6}{10} \times 0,5 = 0,3$$

Jumlah Lintasan Trayek Kebutuhan

$$= 0,3 \times 30\% \text{ (Bobot Angkutan ASDP)}$$

$$= 9 \%$$

- **Ratio Konektivitas Kabupaten = IK 1 + IK 2 = 42% + 9% = 51 % (Untuk Tahun 2023)**

Sukabumi, 29 Desember 2023
Dinas Perhubungan


Drs. H BUDIANTO, M.Si
Muda Muda / Irc
Nip. 19670617 199603 1 001



Lampiran 16 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,13	1,80	2,15	5,40	4,24
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-5,84	2,81	3,28	3,97	0,88
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,88	-1,06	5,46	6,12	5,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,63	-3,28	9,86	5,09	5,60
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,54	20,44	9,53	6,48	5,20
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,88	-4,30	6,79	1,59	4,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,33	-7,54	3,28	4,72	4,65
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,66	-1,15	0,24	6,99	9,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	9,25	-4,09	~0	10,10	5,85
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,12	25,98	8,35	6,89	7,20



Lampiran 17 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

REKAPITULASI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN					
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI					
Nilai Total Indeks Per Jenis Kelamin Laki-Laki					
Jumlah PNS Laki-Laki	5342				
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi	13,22				
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi	16,94				
Nilai rata2 Dimensi Kinerja	30,00				
Nilai rata2 Dimensi Disiplin	4,94				
Nilai Total Indeks Per Jenis Kelamin Perempuan					
Jumlah PNS Perempuan	4370				
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi	14,09				
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi	18,33				
Nilai rata2 Dimensi Kinerja	30,00				
Nilai rata2 Dimensi Disiplin	4,98				
Nilai Total Indeks Per Jenis Jabatan					
	Struktural	Fungsional	Pelaksana		
Jumlah PNS	1212	6272	2228		
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi	16,62	14,47	9,56		
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi	26,25	18,04	11,50		
Nilai rata2 Dimensi Kinerja	30,00	30,00	30,00		
Nilai rata2 Dimensi Disiplin	4,89	4,98	4,93		
Nilai Total Indeks Per Jenjang Jabatan					
	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	41	19,02	38,17	30,00	4,59
JABATAN ADMINISTRATOR	255	18,33	38,29	30,00	4,84
JABATAN PENGAWAS	916	16,04	22,37	30,00	4,91
JABATAN FUNGSIONAL	6272	14,47	18,04	30,00	4,98
JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA	0	0,00	0,00	0,00	0,00



JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
JABATAN FUNGSIONAL MAHIR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
JABATAN FUNGSIONAL PEMULA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
JABATAN PELAKSANA	2228	9,56	11,50	30,00	4,93	
Nilai Total Indeks Per Tingkat Pendidikan						
	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
S3	10	25,00	31,00	30,00	4,60	
S2	1175	0,00	24,24	30,00	4,92	
S1/D4/Sederajat	6183	0,00	17,12	30,00	4,97	
D3	908	0,00	22,48	30,00	4,96	
D1/D2/SMA/Sederajat	1294	0,00	11,15	30,00	4,92	
SD/SMP/Sederajat	142	0,00	7,78	30,00	4,97	
Nilai Indeks Profesionalitas IP ASN						
Jumlah ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
9712	13,61	19,72	30,00	4,96	66,13	Rendah



Lampiran 19 Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik (BPS) for Kabupaten Sukabumi. The page displays the Gender Development Index (IPG) for 2021-2022. The data is presented in a table with columns for the province/city and the years 2021 and 2022. The search results show that Sukabumi has an IPG of 87.44 in 2021 and 87.64 in 2022, while Kota Sukabumi has an IPG of 91.58 in 2021 and 91.83 in 2022. A note indicates that the 2016 data is only at the provincial level.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2021	2022
Sukabumi	87,44	87,64
Kota Sukabumi	91,58	91,83



Lampiran 20 Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
188	Kabupaten Katingan	45,61	Inovatif
189	Kabupaten Pidie Jaya	45,58	Inovatif
190	Kabupaten Tojo Una-Una	45,46	Inovatif
191	Kabupaten Halmahera Timur	45,43	Inovatif
192	Kabupaten Konawe Kepulauan	45,30	Inovatif
193	Kabupaten Lebak	45,22	Inovatif
194	Kabupaten Sinjai	45,01	Inovatif
195	Kabupaten Boalemo	44,96	Inovatif
196	Kabupaten Luwu	44,95	Inovatif
197	Kabupaten Jepara	44,88	Inovatif
198	Kabupaten Lampung Tengah	44,80	Inovatif
199	Kabupaten Sukabumi	44,76	Inovatif



Lampiran 21 Hasil Pengukuran Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2023	REALISASI 2023
					Kinerja	Kinerja
					Target	Target
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	8,81	21,83	35,48



**Lampiran 22 Hasil Pengukuran Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi**

Tabel 6. Skor Pola Pangan Harapan

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH		Selisih
		2022	Ideal	
1	Padi-padian	25,0	25,0	0,0
2	Umbi-umbian	1,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	23,4	24	0,6
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,1	1	0,9
6	Kacang-kacangan	7,4	10	2,6
7	Gula	1,2	2,5	1,3
8	Sayur dan Buah	29,6	30	0,4
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0
Skor PPH Kabupaten Sukabumi*		93,6	100,0	6,4

* AKE: 2.100 kkal/kap/hari



Lampiran 23 Hasil Pengukuran Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas

Target dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri Tahun Anggaran 2023 dengan Target Indikator Kinerja adalah Persentase IKM Mandiri sebesar 9,58% atau sebanyak 50 IKM dengan pencapaian target sebesar 100% dan Persentase Naik Kelas Kemampuan IKM sebesar 100% atau sebanyak 900 IKM dengan Pencapaian Target sebesar 100,22% atau sebanyak (902 IKM) yang naik kelas kemampuannya.



Lampiran 24 Hasil Pengukuran Persentase Pemajuan Budaya



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal A. Yani – Komplek GOR Palabuhanratu
Telp. (0266) 6446998 E-mail : dinas.budpora@gmail.com
PALABUHANRATU, 43364 SUKABUMI

SURAT KETERANGAN

Nomor :400.6.1/68/Budaya/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Ardiana Trisnawiana, M.M.
NIP : 196406111985031011
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga

Menerangkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 memiliki Persentase Pemajuan Kebudayaan sebesar **24.143 %** dengan rumus hitung yang dipakai sebagai berikut

$$\frac{(OPK \text{ DL, DK, DM, DB}) + (ODCB \text{ yang dilestarikan})}{\text{Jumlah OPK + ODCB}} \times 100\% = \text{Persentase PK}$$

$$\frac{54 + 101}{642} \times 100\% = 24.143\%$$

Keterangan	
PK	: Pemajuan Kebudayaan
OPK	: Objek Pemajuan Kebudayaan
DL	: Dilindungi
DK	: Dikembangkan
DM	: Dimanfaatkan
DB	: Dibina
ODCB	: Objek yang Diduga Cagar Budaya

Adapun data yang digunakan dalam menghitung persentase tersebut dilampirkan dalam surat keterangan ini.


Demikian surat keterangan ini dibuat.

Palabuhanratu, 24 Januari 2024
KEPALA DINAS

Drs. H. ARDIANA TRISNAWIANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/c
NIP. 196406111985031011




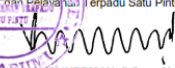
Lampiran 25 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan Investasi
Sektor Agribisnis dan Pariwisata
Realisasi Investasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Raya Binyangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon : (0266) 4391111 Faksimil : (0266) 4391111 website http://dpmptsp.sukabumikab.go.id e-mail : dpmptsp.kabsni@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id PALABUHANRATU - 43364</small>											
REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023											
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Target	Realisasi		Realisasi	Capaian	Keterangan	
					2023			%	%		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	9	
1	Meningkatnya laju investasi daerah Sektor Agribisnis dan Pariwisata	Nilai realisasi investasi daerah	%	$\left[\frac{(\sum \text{Investasi.AT}) - (\sum \text{Investasi.AT2020})}{(\sum \text{Investasi.AT2020})} \right] \times 100$	3.00	Rp. 750,713,746,143	- Rp. 115,539,340,770	x 100 %	549.75	18,324.91	
							115,539,340,770				

Keterangan :

- AT = Agriculture and Tourism (Pertanian dan Pariwisata)
- t = Tahun Berjalan
- Σ = Jumlah



Palabuhanratu, 09 Januari 2024
 Pdt. Kepala
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SUHERMAN, S.Sos., M.Si.
NID. 46744404.100303.1.002



Lampiran 26 Hasil Pengukuran Angka Kematian Ibu

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022							
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ciomas	Ciomas	338				0
2	Ciomas	Tamanjaya	528				0
3	Ciracap	Ciracap	882				0
4	Waluran	Waluran	491			1	1
5	Surade	Surade	649			1	1
6	Surade	Bunlwangi	643				0
7	Cibitung	Cibitung	454				0
8	Jampangkulon	Jampangkulon	765				0
9	Cimanggu	Cimanggu	437			1	1
10	Kalibunder	Kalibunder	518				0
11	Tegalbuleud	Tegalbuleud	374				0
12	Tegalbuleud	Bangbayang	146			1	1
13	Cidolog	Cidolog	292			1	1
14	Sagaranten	Sagaranten	730			1	1
15	Cidadap	Cidadap	284				0
16	Curugkembar	Curugkembar	545				0
17	Pabuaran	Pabuaran	816		2		2
18	Lengkong	Lengkong	554				0
19	Palabuhanratu	Palabuhanratu	1.062		1	1	2
20	Palabuhanratu	Citark	700				0
21	Simpenan	Simpenan	976			1	1
22	Warungklara	Warungklara	966			1	1
23	Bantargadung	Bantargadung	697				0
24	Jampangtengah	Jampangtengah	1.014	1			1
25	Purabaya	Purabaya	698				0
26	Cikembar	Cikembar	1.395		2	1	3
27	Nyalindung	Nyalindung	442				0
28	Nyalindung	Cijangkar	357				0
29	Gegerbitung	Gegerbitung	657				0
30	Sukaraja	Sukaraja	851			1	1
31	Sukaraja	Limbangan	651				0
32	Kebonpedes	Kebonpedes	632				0
33	Cireunghas	Cireunghas	577				0
34	Sukalarang	Sukalarang	852				0
35	Sukabumi	Karawang	810	1			1
36	Kadudampit	Kadudampit	949		1		1
37	Cisaat	Cisaat	1.028				0
38	Cisaat	Selajambe	503			1	1
39	Gununggruh	Gununggruh	705	1			1
40	Gununggruh	Cibolang	690				0
41	Cibadak	Cibadak	646				0
42	Cibadak	Sekarwangi	1.089	1	1		2
43	Cicantayan	Cicantayan	955				0
44	Caringin	Caringin	879				0
45	Nagrak	Nagrak	797		1	1	2
46	Nagrak	Girijaya	575				0
47	Clambar	Clambar	742				0
48	Cicurug	Cicurug	816				0
49	Cicurug	Cipari	562				0
50	Cidahu	Cidahu	1.371				0



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Parakansalak	Parakansalak	661			1	1
52	Parungkuda	Parungkuda	1.259		1		1
53	Bojonggenteng	Bojonggenteng	762	1		2	3
54	Kalapanunggal	Kalapanunggal	833			1	1
55	Cikidang	Cikidang	1.172				0
56	Cisolok	Cisolok	1.179				0
57	Cikakak	Cikakak	813			1	1
58	Kabandungan	Kabandungan	963				0
JUMLAH (KAB/KOTA)			33.759	5	9	18	32
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)							74,8152997

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Sukabumi
 Sekretaris Dinas

 Mutiara Sukanda.M.H.Kes
 197106232006042009



Lampiran 27 Hasil Pengukuran Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 3 Desa Cimanggu, Telepon/Fax/Email : pu.kab.sukabumi@gmail.com
PALABUHANRATU 43364

**DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023**

Kabupaten / Kota : Kabupaten Sukabumi
Tahun : 2023

NO	KODE DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (HA)			SALURAN						BANGUNAN				Kondisi (%)	KET				
			Baku	Potensial	Fungsional	Primer (m ³)		Sekunder (m ³)		Tersier (m ³)		Bendung	Bang. Utama	Bang. Lainnya	Jumlah			Kondisi Baik Irigasi			
						Total	Terbangun	Total	Terbangun	Total	Terbangun										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I UPTD SUKABUMI																					
1	3	2	0	2	0	1	01	Suradita I	191,00	159,93	31,07	2.359,30	1.651,51	0	0	1	3	9	13	32,12%	
2	3	2	0	2	0	1	02	Gegerbung	94,00	89,20	4,80	329,60	253,79	0	0	1	4	14	19	43,85%	
3	3	2	0	2	0	1	03	Gegerbung	220,00	(60,50)	280,50	1.900,00	1.470,67	0	0	1	7	10	28	45,63%	
4	3	2	0	2	0	1	04	Suradita II	136,00	79,39	57,61	3.279,00	2.648,89	0	0	1	3	9	13	23,85%	
5	3	2	0	2	0	1	05	Candi	72,00	37,27	34,73	492,50	308,56	0	0	1	4	9	13	58,52%	
6	3	2	0	2	0	1	06	Cimuncang	299,00	101,79	197,21	3.000,00	2.100,00	0	0	1	3	27	31	51,63%	
7	3	2	0	2	0	1	07	Cikapek	97,00	1,88	95,02	874,30	677,87	0	0	1	3	6	10	36,29%	
8	3	2	0	2	0	1	08	Cibeureum Areban	100,00	1,71	98,29	1.600,00	1.211,73	0	0	1	6	3	10	55,50%	
9	3	2	0	2	0	1	09	Batu Karut	366,00	(4,90)	370,90	3.254,90	1.693,81	0	0	1	2	13	16	23,48%	
10	3	2	0	2	0	1	10	Regal Parjang	110,00	59,13	50,87	1.973,00	1.551,22	0	0	1	4	5	10	39,85%	
11	3	2	0	2	0	1	11	Cimulang	114,00	96,41	17,59	476,10	302,68	0	0	1	3	5	9	57,20%	
12	3	2	0	2	0	1	12	Cipada Cipekumbang	60,00	2,97	57,03	2.360,00	786,67	0	0	1	1	23	25	45,67%	
13	3	2	0	2	0	1	13	Sudajaya Girang	150,00	125,91	24,09	1.250,40	1.029,50	0	0	1	2	10	13	41,56%	
14	3	2	0	2	0	1	14	Sukamanis	176,00	38,88	137,12	2.136,00	1.512,29	0	0	1	5	8	14	36,54%	
15	3	2	0	2	0	1	15	Clebakkuh	200,00	39,51	160,49	2.630,00	1.219,15	0	0	1	17	2	19	46,36%	
16	3	2	0	2	0	1	16	Cikupa/Cipada	169,00	40,14	128,86	2.200,00	1.848,00	0	0	1	1	20	21	45,67%	
17	3	2	0	2	0	1	17	Ciranu	659,00	191,04	467,96	4.130,00	3.500,00	4,670	2.300,00	0	1	8	2	11	47,85%
18	3	2	0	2	0	1	18	Ciranu II	143,00	-	143,00	6.981,70	6.836,56	0	0	1	5	28	34	38,64%	
19	3	2	0	2	0	1	19	Leuw Munding	200,00	157,50	42,50	2.361,20	702,15	0	0	1	4	6	11	42,41%	
								Sub Total	3.561,00	1.144,36	2.416,64	43.390	30.021	4,670	2.300,00	-	19,00	80,00	208,00	307,00	43,7%
II UPTD OBADAK																					
1	3	2	0	4	0	2	01	Cibatu	125,00	56,86	68,14	1.864,00	1.325,10	0	0	1	10	10	21	37,73%	
2	3	2	0	4	0	2	02	Muara Cibodas	200,00	81,80	118,20	4.205,00	2.890,22	0	0	1	9	6	16	29,46%	
3	3	2	0	4	0	2	03	Cibong	60,00	12,69	47,31	1.300,00	2.373,69	0	0	1	3	7	11	42,12%	
4	3	2	0	4	0	2	04	Cibong	100,00	(24,50)	124,50	4.563,00	3.123,51	0	0	1	11	25	27	42,33%	
5	3	2	0	4	0	2	05	Cibong	156,00	43,00	113,00	16.794,00	8.493,06	5.900,00	2.800,00	0	1	42	10	56	30,30%
6	3	2	0	4	0	2	06	Cikawewang	241,00	132,56	108,04	7.517,20	3.454,80	7,640	0	0	1	24	38	58,51%	
7	3	2	0	4	0	2	07	Ciawah Babakan	70,00	70,00	-	2.191,00	-	0	0	0	1	3	8	12	48,57%
8	3	2	0	4	0	2	08	Leuwibangg	70,00	1,51	68,08	2.669,00	1.911,68	0	0	0	1	8	9	49,31%	
9	3	2	0	4	0	2	09	Caling	222,00	52,27	169,73	1.985,00	1.304,37	0	0	1	8	10	19	57,62%	
III UPTD CICURUG																					
1	3	2	0	4	0	3	01	Ciutara	184,00	110,25	73,75	6.000,00	2.860,00	0	0	1	17	14	32	58,90%	
2	3	2	0	4	0	3	02	Cisalon	90,00	32,67	57,33	2.900,00	1.356,44	0	0	1	7	9	17	32,45%	
3	3	2	0	4	0	3	03	Cigibang	74,00	(95,00)	109,00	2.500,00	2.000,00	0	0	2	5	13	20	53,12%	
4	3	2	0	4	0	3	04	Cikanti Nyalindung	61,00	22,77	38,23	1.003,30	317,04	0	0	1	4	3	7	36,42%	
5	3	2	0	4	0	3	05	Citaman	215,00	27,18	187,82	5.165,00	3.713,92	0	0	1	8	21	30	36,80%	
6	3	2	0	4	0	3	06	Cibong Girang	62,00	(33,60)	95,60	1.013,00	450,45	0	0	1	3	4	7	37,53%	
7	3	2	0	4	0	3	07	Cikaru Manglad	118,00	30,87	87,13	1.800,00	1.335,60	0	0	1	8	2	11	35,64%	
8	3	2	0	4	0	3	08	Cinala	78,00	(15,14)	93,14	1.500,00	775,33	1.150	500	0	1	2	6	9	34,54%
9	3	2	0	4	0	3	09	Ciwanu Bojong	100,00	47,61	52,39	452,20	222,58	0	0	1	5	2	8	35,64%	
10	3	2	0	4	0	3	10	Sukarame	342,00	195,57	146,43	5.500,00	2.410,44	0	0	1	9	25	35	39,70%	
11	3	2	0	4	0	3	11	Cipalasar Babakan	130,00	84,96	45,04	1.300,00	404,44	0	0	1	9	10	19	38,54%	
12	3	2	0	4	0	3	12	Cipamatatan	54,00	27,45	26,55	2.100,00	1.396,60	0	0	1	8	4	13	53,53%	
13	3	2	0	4	0	3	13	Cibantar	67,00	-	67,00	3.961,30	3.241,99	0	0	1	4	8	13	45,68%	
14	3	2	0	4	0	3	14	Ciwanu Palasari	56,00	43,83	12,17	976,80	290,72	0	0	1	4	0	5	47,61%	
15	3	2	0	4	0	3	15	Cibodas	200,00	155,52	44,48	2.400,00	1.747,87	0	0	1	7	12	20	29,30%	
16	3	2	0	4	0	3	16	Cipanengah	68,00	35,37	32,63	2.246,00	1.653,52	0	0	1	4	14	19	54,63%	
17	3	2	0	4	0	3	17	Cingena	226,00	167,40	58,60	2.000,00	1.060,89	0	0	1	19	20	20	55,39%	
18	3	2	0	4	0	3	18	Leuw Laying	65,00	54,36	10,64	807,70	311,77	0	0	1	1	1	2	38,60%	
19	3	2	0	4	0	3	19	Tirta Bakti	190,00	146,70	43,30	1.898,00	1.034,62	0	0	1	12	7	20	43,63%	
20	3	2	0	4	0	3	20	Cigong	56,00	0,27	55,73	2.300,00	1.117,47	0	0	1	1	1	2	36,74%	
21	3	2	0	4	0	3	21	Cikantengulo	150,00	41,67	108,33	2.000,00	1.583,11	0	0	1	3	2	6	38,54%	
22	3	2	0	4	0	3	22	Jayamekar	213,00	31,86	181,14	12.500,00	5.344,44	0	0	1	4	8	15	45,68%	
23	3	2	0	4	0	3	23	Sabulunggan	169,00	70,65	98,35	4.472,00	1.689,42	0	0	1	14	15	15	35,42%	
24	3	2	0	4	0	3	24	Citirik II	150,00	79,98	70,02	3.884,00	2.064,56	0	0	1	3	4	4	33,87%	
25	3	2	0	4	0	3	25	Ciamerang	250,00	173,07	76,93	5.500,00	-	0	0	1	3	4	4	33,87%	
26	3	2	0	4	0	3	26	Cimanggu	150,00	104,58	45,42	4.300,00	-	0	0	1	3	5	9	38,74%	



NO	KODE DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (HA)			SALURAN						BANGUNAN				Kondisi (%)	KET	
			Baku	Potensial	Fungsional	Primer (m)		Sekunder (m)		Tersier (m)		Bendung	Bang. Utama	Bang. Lainnya	Jumlah			
						Total	Terbangun	Total	Terbangun	Total	Terbangun							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Sub Total			3.518,00	1.600,85	1.917,15	80.479	36.483	1.150	500				25	182	148	333	46,78%	
IV UPTD PALABUHANRATU																		
1	3	2	0	4	0	01	Citarik	168,00	88,97	79,03	16.000,00	10.023,11						
2	3	2	0	4	0	02	Citapus	100,00	7,92	92,08	3.360,00	1.304,08						
3	3	2	0	4	0	03	Cikunhug	400,00	165,90	234,10	7.295,00	2.953,12						
4	3	2	0	4	0	04	Cigobang	125,00	65,97	59,03	2.745,00	1.523,21						
5	3	2	0	4	0	05	Bantarheunca	250,00	130,41	119,59	3.540,00	2.891,79						
6	3	2	0	4	0	06	Babakan Wareng	70,00	22,20	47,80	700,00	551,91						
7	3	2	0	4	0	07	Pasirmalang	70,00	(13,30)	83,30	4.198,00	1.808,69						
8	3	2	0	4	0	08	Warungklara	507,00	93,06	413,94	6.495,50	5.036,18						
9	3	2	0	4	0	09	Tarisi	430,00	164,97	265,03	4.295,00	1.893,18						
10	3	2	0	4	0	10	Cukang Lemah	585,00	521,10	63,90	5.505,00	2.073,86						
11	3	2	0	4	0	11	Cibalanak	200,00	60,03	139,97	3.800,40	1.906,96						
12	3	2	0	4	0	12	Bihbul	120,00	47,70	72,30	3.681,50	2.089,27						
13	3	2	0	4	0	13	Cipuhung	317,00	110,22	206,78	3.458,50	1.511,75						
14	3	2	0	4	0	14	Cimartanjung	199,00	128,88	70,12	2.700,00	1.509,20						
15	3	2	0	4	0	15	Cicemet	125,00	81,81	43,19	1.900,00	1.156,53						
16	3	2	0	4	0	16	Cimapag	125,00	47,70	77,30	3.150,00	2.027,20						
17	3	2	0	4	0	17	Cikatak	200,00	14,58	185,42	4.760,70	2.480,85						
18	3	2	0	4	0	18	Cikukawayana	949,00	148,32	200,68	5.125,20	2.388,34						
19	3	2	0	4	0	19	Cisigung	75,00	41,40	33,60	4.600,00	3.211,82						
Sub Total			4.415,00	1.927,84	2.487,16	87.310	48.131						30	201	206	537	50,61%	
V UPTD JAMPANGTENGGAH																		
1	3	2	0	4	0	01	Citampian	60,00	35,01	24,99	1.488,50							
2	3	2	0	4	0	02	Cikokosan	76,00	50,31	25,69	931,40	487,64						
3	3	2	0	4	0	03	Cimunding	103,00	85,68	17,32	1.687,60	1.332,21						
4	3	2	0	4	0	04	Cicepe	80,00	49,47	30,53	2.219,00	1.580,03						
5	3	2	0	4	0	05	Cimapag	55,00	32,58	22,42	1.825,60							
6	3	2	0	4	0	06	Cikeutak	72,00	57,96	14,04	709,50	457,08						
7	3	2	0	4	0	07	Cibojong B. Loping	110,00	71,46	38,54	3.092,15	2.392,27						
8	3	2	0	4	0	08	Cipanumbangan	150,00	83,52	66,48	4.515,30	3.700,88						
9	3	2	0	4	0	09	Rancabali	100,00	40,68	59,32	2.330,12	1.785,33						
10	3	2	0	4	0	10	Cipuspa	130,00	57,33	72,67	4.170,00	3.364,81						
11	3	2	0	4	0	11	Dampit	103,00	63,45	39,55	1.656,00	1.105,09						
12	3	2	0	4	0	12	Cbening Girang	190,00	53,76	136,24	2.813,30	2.274,43						
13	3	2	0	4	0	13	Cibibijian	70,00	20,97	49,03	3.449,00							
14	3	2	0	4	0	14	Citalahab II	150,00	77,58	72,42	3.365,90	2.153,66						
15	3	2	0	4	0	15	Citalahab I	85,00	40,23	44,77	1.923,10	1.655,58						
16	3	2	0	4	0	16	Cilimus	80,00	41,13	38,87	2.044,00	1.373,55						
17	3	2	0	4	0	17	Ciangsana II	57,00	36,45	20,55	1.368,46	986,51						
Sub Total			1.671,00	897,57	773,43	39.589	24.709						17	141	92	270	64,18%	
VI UPTD JAMPANGKULON																		

NO	KODE DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (HA)			SALURAN						BANGUNAN				Kondisi (%)	KET	
			Baku	Potensial	Fungsional	Primer (m)		Sekunder (m)		Tersier (m)		Bendung	Bang. Utama	Bang. Lainnya	Jumlah			
						Total	Terbangun	Total	Terbangun	Total	Terbangun							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Sub Total			2.750,00	1.370,74	1.379,26	45.161	23.223						15	115	252	382	56,17%	
VII UPTD SAGARANTEN																		
1	3	2	0	4	0	01	Cibodas II	100,00	63,83	36,17	1.300,00	445,18						
2	3	2	0	4	0	02	Cibodas	200,00	95,00	105,00	2.000,00	905,78						
3	3	2	0	4	0	03	Mande Ciampih	97,00	44,37	52,63	1.700,00	1.009,42						
4	3	2	0	4	0	04	Cibelembeng	54,00	31,59	22,41	2.000,00	1.318,67						
5	3	2	0	4	0	05	Bojongsawah	116,00	64,44	51,56	2.800,00	1.194,04						
6	3	2	0	4	0	06	Cibojong	75,00	53,10	21,90	1.900,00	1.315,71						
7	3	2	0	4	0	07	Cibantar I	80,00	9,27	70,73	1.932,00	1.303,92						
8	3	2	0	4	0	08	Cimahi	70,00	-	70,00	2.500,00	1.208,89						
9	3	2	0	4	0	09	Ciampih	107,00	51,21	55,79	1.800,00	1.007,60						
10	3	2	0	4	0	10	Chideung	87,00	27,99	59,01	1.900,00	1.150,20						
11	3	2	0	4	0	11	Cieber	813,00	156,65	656,35	6.500,00	3.055,44	2.030	1.000				
12	3	2	0	4	0	12	Binongari	150,00	62,83	87,17	6.850,00	4.045,01						
13	3	2	0	4	0	13	Ciwitana	188,00	57,72	130,28	4.134,00	2.885,67						
14	3	2	0	4	0	14	Cigembong	80,00	-	80,00	3.850,00	2.452,56						
15	3	2	0	4	0	15	Ciasih I	52,00	31,32	20,68	3.200,00	2.273,42						
16	3	2	0	4	0	16	Ciasih II	249,00	86,42	162,58	3.000,00	1.142,67						
17	3	2	0	4	0	17	Cihonje	88,00	33,66	54,34	1.800,00	1.150,40						
18	3	2	0	4	0	18	Sempurnungul	59,00	22,05	36,95	2.200,00	953,82						
Sub Total			2.643,00	891,45	1.751,55	51.366	29.819	2.030	1.000				19	126	127	272	52,88%	
VIII UPTD CEMAS																		
1	3	2	0	4	0	01	Cikamiah	752,00	309,23	442,77	4.800,00	2.060,80						
2	3	2	0	4	0	02	Ciambutan	150,00	97,20	52,80	1.300,00	959,62						
3	3	2	0	4	0	03	Cimartanjung	230,00	(13,70)	243,70	6.500,00	2.488,44						
4	3	2	0	4	0	04	Cicung	76,00	48,60	27,40	2.500,00	1.060,56						
5	3	2	0	4	0	05	Ciporeang	100,00	54,99	45,01	2.300,00	880,82						
6	3	2	0	4	0	06	Cibenda	102,00	66,87	35,13	1.230,00	916,49						
7	3	2	0	4	0	07	Cikalang	161,00	26,73	134,27	2.755,00	845,27	400	400				



NO	KODE DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (HA)			SALURAN						BANGUNAN				Kondisi (%)	EET					
			Baku	Potensial	Fungsional	Primer (m ³)		Sekunder (m ³)		Terdier (m ³)		Bendung	Bang. Utama	Bang. Lainnya	Jumlah			Kondisi Baku Irigasi				
						Total	Terbangun	Total	Terbangun	Total	Terbangun											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
8	3	0	4	0	8	08	Rancalutung	151,00	43,92	107,08	3.500,00	860,22			0		0	2	5	13	20	46,67%
9	3	0	4	0	8	09	Tempel	150,00	111,55	38,45	1.229,90	756,80				1	1	1	1	4	5	61,52%
10	3	2	0	4	0	10	Cipanjarkan	202,00	82,80	119,20	1.200,00	789,60				1	8	10	19	19	40,40%	
11	3	2	0	4	0	8	11	Cikejak	215,00	-	215,00	1.300,00	732,33				1	5	25	31	43,30%	
12	3	2	0	4	0	8	12	Cikurug	150,00	84,60	65,40	2.500,00	1.412,78			0	1	3	4	8	56,98%	
13	3	2	0	4	0	8	13	Cihitung	97,00	67,50	29,50	1.600,00	533,33				1	4	9	14	44,73%	
14	3	2	0	4	0	8	14	Cimulek	491,00	133,02	357,98	1.750,00	592,67			0	1	16	15	32	43,71%	
15	3	2	0	4	0	8	15	Pangkalan	365,00	204,66	160,34	3.700,00	1.592,13			0	1	12	17	30	45,73%	
16	3	2	0	4	0	8	16	Citung Gunung	150,00	0,18	149,82	8.504,00	3.826,96				1	37	5	43	46,18%	
17	3	2	0	4	0	8	17	Cipinang-Ciletuh	441,00	149,31	291,69	7.600,00	4.049,99				1	7	13	21	46,37%	
18	3	2	0	4	0	8	18	Gejerebang	441,00	136,76	304,24	5.500,00	2.284,56				1	8	45	54	54,09%	
							Sub Total	4.424,00	1.653,82	2.770,18	59.769	26.443	400	400	-	19	142	304	465	48,95%		
							Total	28.131,00	10.955,19	17.175,81	628.685	288.305	27.310	9.000	-	171	1.237	1.842	3.250	53,47%		

Palaohararas, 29 Desember 2023
Plr. Kepala Dinas Berekam Umum





Lampiran 28 Hasil Pengukuran Persentase Tingkat Kemantapan
Kondisi Jalan Kabupaten

URAIAN	TAHUN				Keterangan
	s/d Desember 2022		s/d Desember 2023		
A. JENIS PERMUKAAN					
1. Tanah	3.76	KM	0.297	25.475	KM 1.803
2. Berbatu	45.104	KM	3.561	184.703	KM 13.075
3. Beraspal	1181.68842	KM	93.288	1140.702	KM 80.751
4. Beton	36.165	KM	2.855	61.725	KM 4.369
5. Tidak dirinci		KM	-	-	KM -
JUMLAH	1,266.714	KM	100.000	1,412.60	KM 100
B. JENIS PERMUKAAN					
1. Baik	289.724	KM	22.872	447.557	KM 31.684
2. Sedang	650.573	KM	5.868	509.192	KM 36.046
3. Rusak	72.029	KM	20.083	231.052	KM 16.986
4. Rusak Berat	254.388	KM		224.810	KM 16.678
JUMLAH	1,266.714	KM			KM 100
C. KELAS JALAN					
1. Kelas I	-	KM	-	-	KM -
2. Kelas II	-	KM	-	-	KM -
3. Kelas III	-	KM	-	-	KM -
4. Kelas III A	-	KM	-	-	KM -
5. Kelas III B	-	KM	-	-	KM -
6. Kelas III C	1,266.714	KM	100.000	1,412.60	KM 100
7. Tidak Dirinci	-	KM	-	-	KM -
JUMLAH	1,266.714	KM		1,412.60	KM 100

Catatan :

KEMANTAPAN JALAN	s/d Desember 2022		s/d Desember 2023		KETERANGAN
Kondisi Baik	289.724	KM	22.872	447.557	KM 31.684
Kondisi Sedang	650.573	KM	51.359	509.192	KM 36.046
Jumlah	940.297	KM	72.821	956.749	KM 67.730

Palabuhanratu, 29 Desember 2023
Pit. Kepala

EKA NANDANG INUGRAHA, S.P., M.M.
NIP. 19670903 199601 1 001



Lampiran 29 Hasil Pengukuran Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2023			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian	
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN								
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.								
	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Poin	3.00	2.60			
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	100.00	76.17	76.17	100	Indikator : Target 115 Titik Blankspot Area, Total 294 Titik Blankspot Area yang Telah Tertangani Realisasi : 23 Titik Blankspot Area di tahun 2023 Sisa Target : 92 Titik Blankspot Area dari 115 Titik Capaian : 76.17%



**Lampiran 30 Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023**



**Lampiran 31 Pernyataan Telah Melakukan Tindak Lanjut
Perbaikan**



Pemerintah
Kabupaten Sukabumi